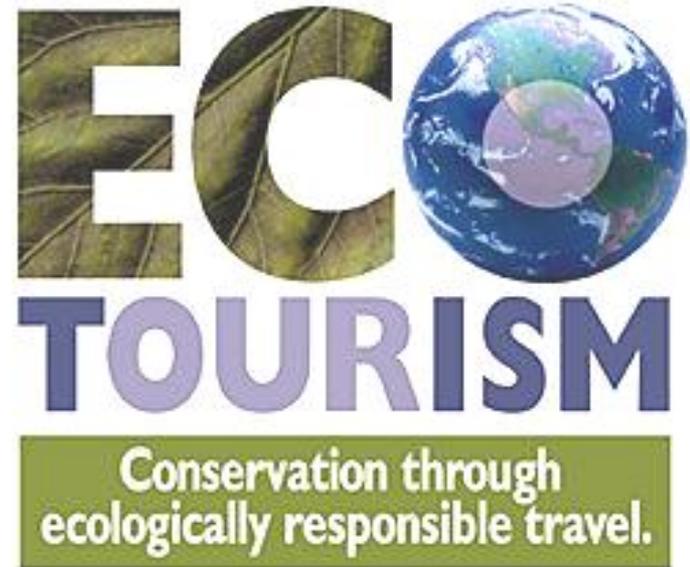


Ekowisata

(2 sks)



Iwan Nugroho

<http://iwanuwg.wordpress.com>

iwanuwg@yahoo.com

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIDYAGAMA
MALANG
2012**

Universitas Widyagama Malang



Judul mk: Ekowisata

Sks: 2 sks

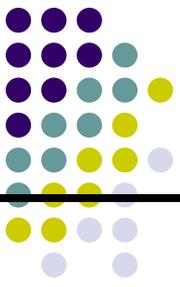
Tujuan:



- i. memahami ekowisata dan hubungannya dengan dunia pariwisata secara umum, dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,
- ii. menjelaskan ekowisata dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah,
- iii. menjelaskan manajemen ekowisata, perihal dari perencanaan, organisasi, implementasi manajemen sumberdaya dan pengendalian khususnya dikaitkan dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan,
- iv. mendiskusikan pengalaman empirik pengembangan ekowisata



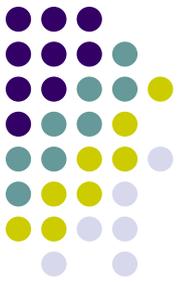
Rencana Pembelajaran



Minggu	Topik	Substansi
I – II	EKOWISATA	Pendahuluan, Definisi, Karakteristik
III - IV	PERENCANAAN WILAYAH	Perencanaan, Kebijakan, Sistem Wilayah
V	ASPEK EKONOMI	Manfaat, produk-jasa, multiplier
VI	ASPEK SOSIAL	Motivasi dan peran stakeholder
VII	ASPEK LINGKUNGAN	Dinamika, dampak
VIII - IX	MANAJEMEN EKOWISATA	Manajemen, Akreditasi Ekowisata
X	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Panduan, Pendekatan lingkungan transportasi
XI	SUMBERDAYA MANUSIA	Job Analysis, Aktivitas, Pendidikan
XII	EKOWISATA DI DUNIA	Brazil, ASEAN dll
XIII-XV	EKOWISATA DI INDONESIA	Sejarah, Taman nasional, Luasan, Masalah dan Kebijakan,

POKOK BAHASAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. EKOWISATA**
- 3. PERENCANAAN WILAYAH**
- 4. ASPEK EKONOMI**
- 5. ASPEK SOSIAL**
- 6. ASPEK LINGKUNGAN**
- 7. MANAJEMEN EKOWISATA**
- 8. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**
- 9. SUMBERDAYA MANUSIA**
- 10. EKOWISATA DI NEGARA LAIN**
- 11. EKOWISATA DI INDONESIA**
- 12. TAMAN NASIONAL DI INDONESIA**



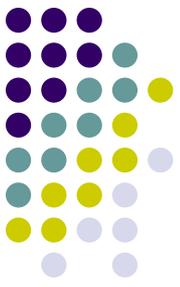
TUJUAN MATAKULIAH



Sesudah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- (i) memahami ekowisata dan hubungannya dengan dunia pariwisata secara umum, dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,
- (ii) menjelaskan ekowisata dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah,
- (iii) menjelaskan manajemen ekowisata, perihal dari perencanaan, organisasi, implementasi manajemen sumberdaya dan pengendalian khususnya dikaitkan dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan,
- (iv) mendiskusikan pengalaman empirik pengembangan ekowisata

Bahan Pustaka



NRMP (Natural Resources Management Program). 1999. Resource Valuation: Tool for Improving Protected Areas Management in Indonesia. The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management. USAID, Jakarta.

Rothberg, D. 1999. Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia. NRMP USAID, Jakarta

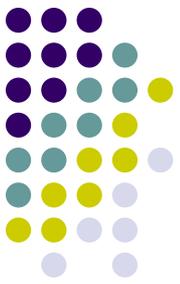
UNESCO. 1996. Biosphere Reserves: The Seville Strategy and the Statutory Framework of the World Network. UNESCO, Paris,

United Nations Commission on Sustainable Development. 2000. What Is Ecotourism? 8th session <http://www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism/home.htm>

USAID Indonesia. 2004. Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia Submitted in accordance with Foreign. Assistance Act Sections 118/119.



Bahan Pustaka



Wood, M. E. 2002. Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability. UNEP.

<http://www.unepie.org/tourism/library/ecotourism.htm>

Eagles, P. F. G., S. F. McCool and C. D. Haynes. 2002. Protected Areas: Guideline for Planning and Management. United Nation Environment Program, World Tourism Organization and The IUCN-World Conservation Union. Best Practice Protected Areas Guideline Series No 8.

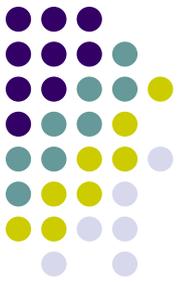
Hundloe, T (ed.). 2002. Linking Green Productivity to Ecotourism: Experiences in the Asia-Pacific Region. Asian Productivity Organization (APO), Tokyo, Japan. 264-269.

Bappenas. 2003. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAB). The National Development Planning Agency (Bappenas)

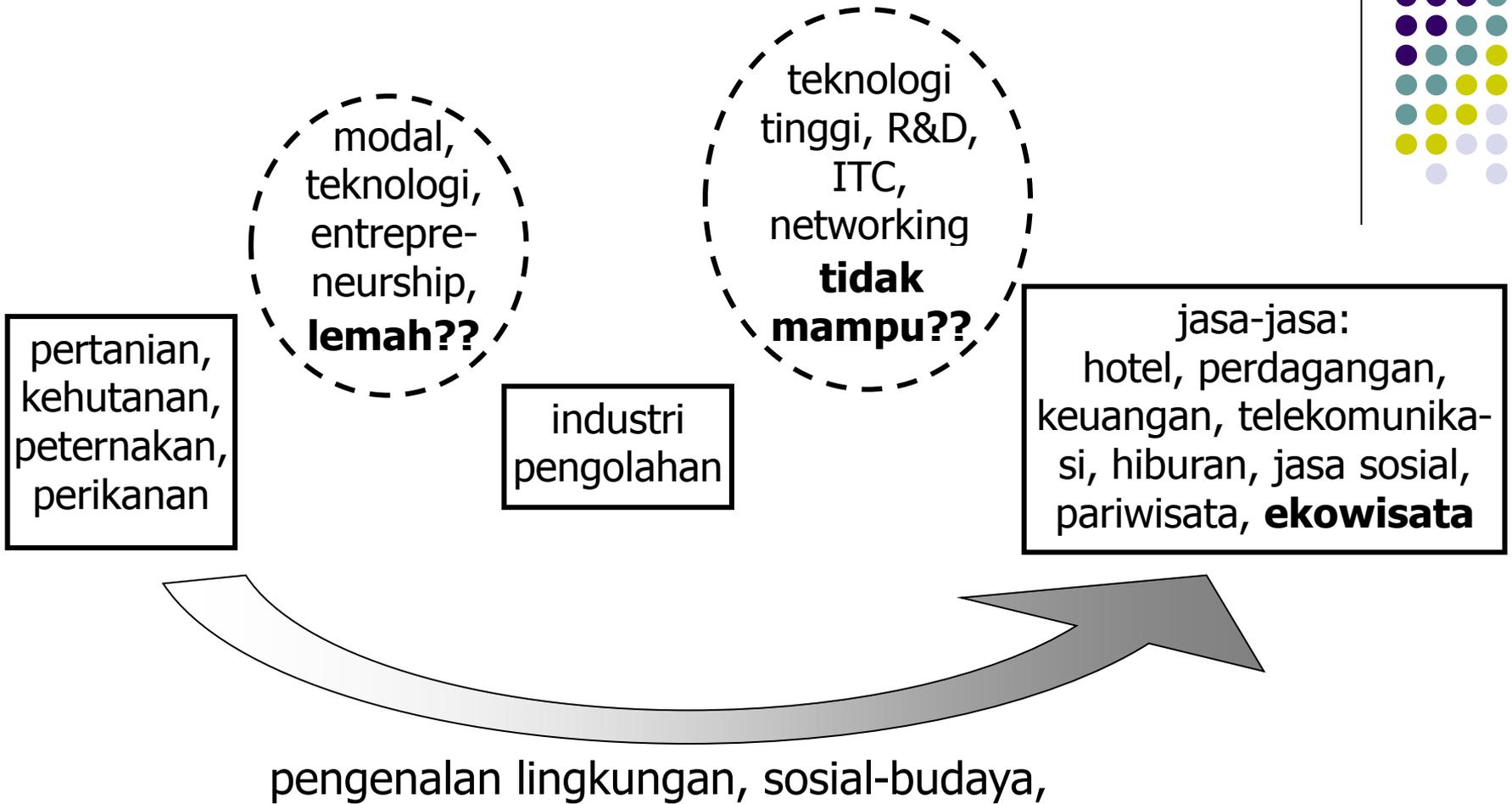
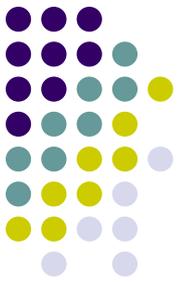
Materi dan pengalaman ekowisata, lihat Blog www.widyagama.ac.id/iwan-nugroho/

Iwan Nugroho. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 362p. ISBN 978-602-9033-31-1





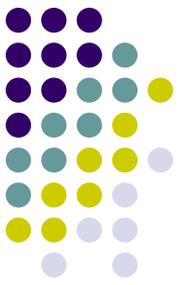
I. PENDAHULUAN



bisa!! perlu pembelajaran

Petani atau penduduk lokal harus menguasai substansi dan kompetensi sektor jasa ekowisata untuk memenuhi permintaan pengunjung.

Alasan-2 fenomena perkembangan ekowisata



- Peningkatan taraf pendidikan dan permintaan perjalanan.
- Populasi yang semakin matang: faktor tabungan, manfaat rekreasi dan kesehatan
- Peningkatan dan perubahan peranan wanita (dalam pengambilan keputusan)
- Perubahan pola waktu senggang: untuk memperdalam studi dan permintaan rekreasi.
- Dinamika dan keinginan setiap orang selalu berubah setiap saat. Keaslian dan keunikan alam dan budaya mulai diperhatikan.
- Pelayanan yang berkualitas: sebagai kompensasi dari korbanan tenaga, waktu dan biaya.
- Kemajuan teknologi dan informasi. Internet dan layanan permintaan rekreasi.



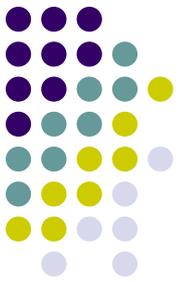


KOMITMEN GLOBAL thd Ekowisata

- Ekowisata (10 tahun terakhir), tumbuh 40 persen di Eropa dan Amerika Latin dan 25 persen di Asia Pasifik.
- Deklarasi Bali tentang Conserving Cultural Heritage for Sustainable Social, Economic and Tourism Development pada tanggal 14 Juli 2000 : "*The tourism industry must recognize that it has a responsibility to contribute to the maintenance of the living culture on which it relies*".
- Lembaga-2 dunia, misalnya Commission on Sustainable Development (CSD), United Nation Environment Programme (UNEP, 2002), atau World Tourism organization (WTO), bersepakat tahun 2002 sebagai tahun wisata internasional.

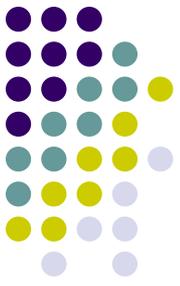
KOMITMEN NASIONAL thd Ekowisata

- UU No 5 tahun 1990 konservasi keanekaragaman hayati,
- Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) (Bappenas, 2003).



II. EKOWISATA

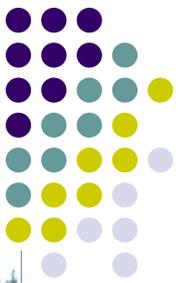
Sejarah Perkembangan Ecotourism



- Film Tarzan vs penjahat yang mengeksploitasi hutan dan isinya.
- Petualangan alam (*wildlife tourism*) ke Kenya (tahun 1970)
- Sejak 1980, ketika produser film, akademisi, jurnalis, atau petualang mampu memvisualisasikan fungsi, kekayaan dan kerentanan hutan tropika basah dan terumbu karang.
- Muncul jasa-jasa wisata alam: menikmati burung, dan flora/fauna lain di Costa Rica, Ecuador, dengan melibatkan pemandu penduduk lokal.
- Industri *outdoor equipment*: ke tujuan wisata hingga Nepal dan Galapagos.

Pembangunan Berkelanjutan:

- Aspek Ekonomi
- Aspek Lingkungan
- Aspek Sosial



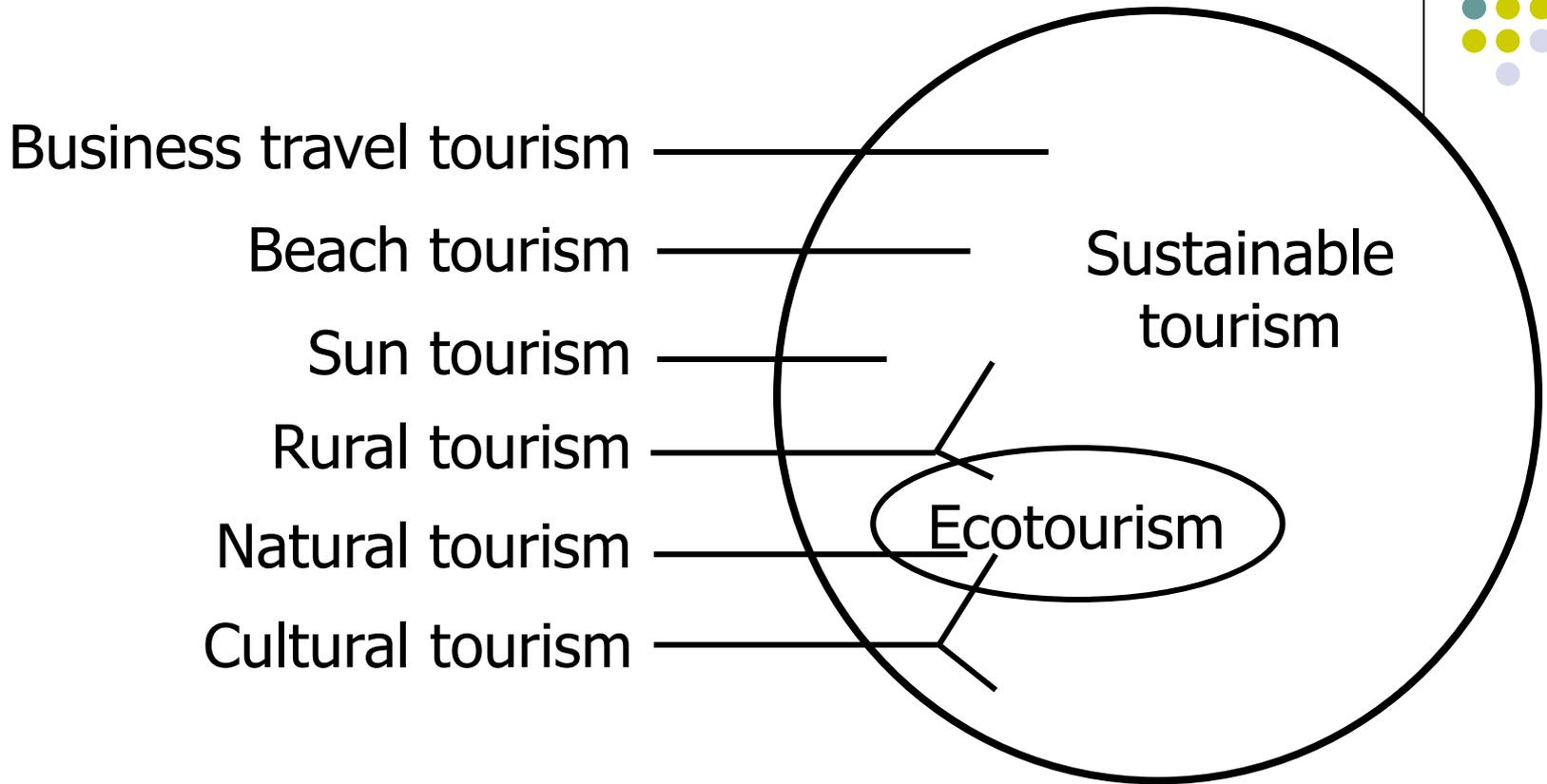
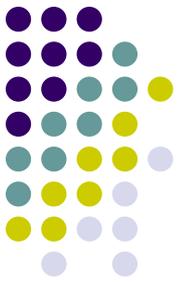
Commision on Sustainable Development (CSD), United Nation Environment Programme (UNEP), World Tourism organization (WTO), The International Ecotourism Society (TIES), World Conservation Union (WCU)



Pengertian Ekowisata

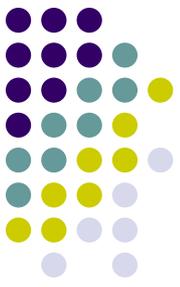
Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur **pendidikan**, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan **kesejahteraan** penduduk lokal serta upaya-upaya **konservasi** sumberdaya alam dan lingkungan





Sustainable tourism and ecotourism (Wood, 2002)





Karakteristik operasi jasa ecotourism:

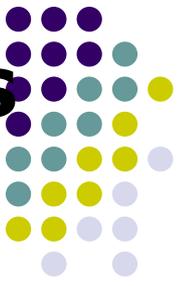
1. Efisien dan ramping (orang, manajemen, sumberdaya)
2. Terdiri dari kelompok-kelompok kecil (< 25 orang).
3. Akomodasi kurang dari 100 tempat tidur (UKM lokal).
4. Unsur pendidikan yang sistematis dan komprehensif.
5. Memerlukan specialist guide yang trampil, pintar dan berdedikasi

Stakeholder ecotourism:

pemerintah, swasta, LSM, penduduk lokal, perguruan tinggi, organisasi internasional.

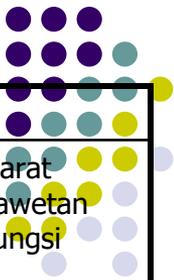


Pengembangan jasa ecotourism harus profesional:



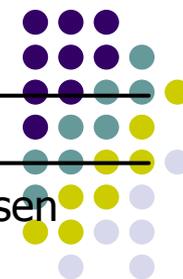
- Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata
- Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif
- Keterlibatan penduduk lokal dlm memandu/menerjemahkan obyek wisata
- Kebijakan pemerintah (subsidi) dalam kerangka melindungi aset lingkungan dan kultural
- Pengembangan kemampuan penduduk lokal

Kategori Pengelolaan Kawasan Konservasi IUCN



No	Deskripsi	Keterangan (kesepadanan)
Ia	Strict Nature Reserve/Wilderness Area: Protected area managed mainly for science or wilderness	Kawasan suaka alam; adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (UU No 5 tahun 1990)
Ib	Wilderness Area: Protected area managed mainly for wilderness protection	Suaka Margasatwa, adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya (UU No 5 tahun 1990)
II	National Park: Protected area managed mainly for ecosystem protection and recreation.	Taman nasional; adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (UU No 5 tahun 1990)
III	Natural Monument: Protected area managed mainly for conservation of specific natural features	Monumen alam atau yang meonumental; hal-hal yang khusus, antara lain situs warisan dunia (World Heritage Site), dan situs Ramsar
IV	Habitat/Species Management Area: Protected area managed mainly for conservation through management intervention.	Taman hutan raya (Grand Forest Park); adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (UU No 5 tahun 1990)
V	Protected Landscape/Seascape: Protected area managed mainly for landscape/seascape conservation and recreation.	Taman wisata alam; adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam (UU No 5 tahun 1990)
VI	Managed Resource Protected Area: Protected area managed mainly for the sustainable use of natural ecosystems.	Taman buru atau hunting park, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (UU No 41 tahun 1999)

Tabel Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia

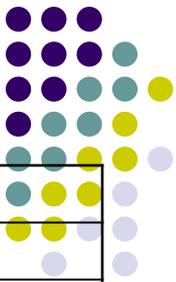


Klasifikasi area	Jumlah	Luas	
		ha	persen
1. Daratan (Terrestrial Areas)			
- Taman nasional (National Parks)	35	11.291.754	61
- Cagar alam (Strict Nature Reserves)	173	2.718.566	15
- Suaka margasatwa (Wildlife Reserves)	53	3.548.018	19
- Taman wisata alam (Nature Recreation Parks)	87	283.873	2
- Taman hutan raya (Grand Forest Parks)	17	334.336	2
- Taman buru (Hunting Parks)	14	222.411	1
Sub-Total	379	18.398.958	100
2. Pesisir dan Laut (Marine Areas)			
- Taman nasional (National Parks)	6	3.680.936	78
- Cagar alam (Strict Nature Reserves)	8	211.555	4
- Suaka margasatwa (Wildlife Reserves)	3	65.220	1
- Taman wisata alam (Nature Recreation Parks)	18	765.762	16
Sub-Total	35	4.723.474	100
3 Total (Combined Totals):			
- Taman nasional (National Parks)	41	14.972.690	65
- Cagar alam (Strict Nature Reserves)	181	495.429	2
- Suaka margasatwa (Wildlife Reserves)	56	3.613.238	16
- Taman wisata alam (Nature Recreation Parks)	105	1.049.635	5
- Taman hutan raya (Grand Forest Parks)	17	334.336	1
- Taman buru (Hunting Parks)	14	222.411	1
Total	414	23.122.432	100

Universitas Widyagama Malang

Sumber: PHKA (2002) dikutip dalam USAID Indonesia (2004)

Kawasan Taman Nasional di Indonesia



Jawa	1. Karimunjawa	5. Gunung Gede Pangrango ^a	9. Alas Purwo
	2. Bromo Tengger Semeru	6. Gunung Halimun	10. Gunung Merapi
	3. Meru Betiri	7. Kep Seribu	11. Gunung Merbabu
	4. Baluran	8. Ujung Kulon ^b	12. Gunung Ciremai
Sumatera	1. Gunung Leuser ^{a b}	5. Bukit Duabelas	9. Way Kambas
	2. Siberut ^a	6. Berbak ^c	10. Batang Gadis
	3. Kerinci Seblat ^b	7. Sembilang	11. Tesso Nilo
	4. Bukit Tigapuluh	8. Bukit Barisan Selatan ^b	
Kalimantan	1. Gunung Palung	4. Bukit Baka-Bukit Raya	7. Kayan Mentarang
	2. Danau Sentarum ^c	5. Tanjung Puting ^a	8. Sebangau
	3. Betung Kerihun	6. Kutai	
Sulawesi	1. Bunaken	4. Taka Bonerate	7. Kepulauan Togean
	2. Bogani Nani Wartabone	5. Rawa Aopa Watumohai	8. Bantimurung - Bulusaraung
	3. Lore Lindu ^a	6. Wakatobi	
Bali dan Nusa Tenggara	1. Bali Barat	3. Komodo ^{a b}	5. Laiwangi Wanggameti
	2. Gunung Rinjani	4. Manupeu Tanah Daru	6. Kelimutu
Maluku dan Papua	1. Manusela	3. Teluk Cendrawasih	5. Wasur
	2. Aketajawe - Lolobata	4. Lorentz ^b	



Jasa ekowisata VS TN

Pelaksanaan jasa ekowisata dalam TN karena memiliki sistem dan SOP:

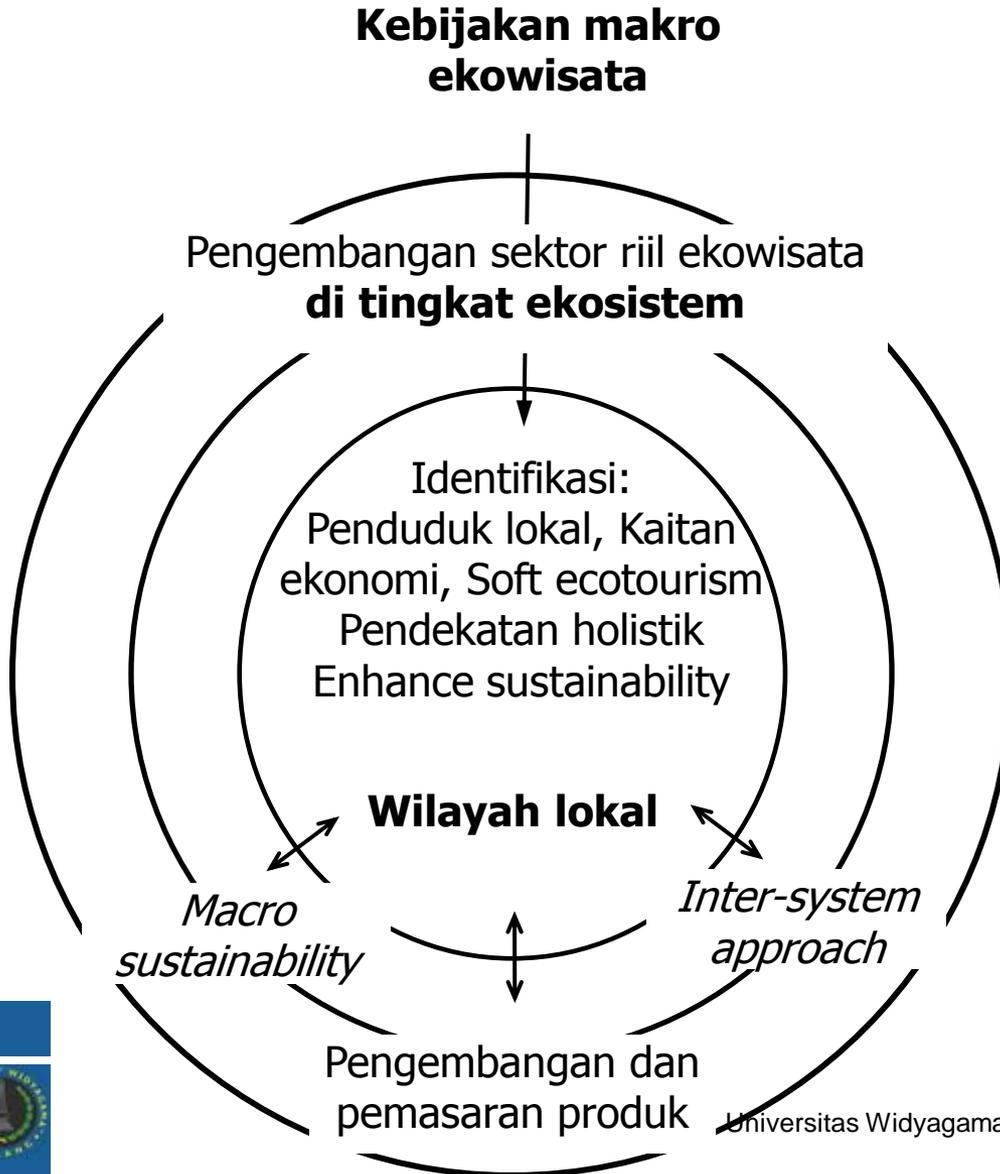
- *pengelolaan ekosistem,*
- *standar dan prosedur mutu pengelolaan lingkungan,*
- *keamanan dan kenyamanan,*
- *kegiatan-kegiatan pendidikan/ketrampilan, penelitian dan pengembangan,*
- *partisipasi pengelolaan oleh operator/swasta,*
- *kerjasama internasional,*
- *pengembangan promosi.*



III. PERENCANAAN WILAYAH EKOWISATA



Perencanaan Wilayah Ekowisata



- **Tingkat nasional:** teritori nasional, peraturan/UU, kerjasama global, \Rightarrow legislasi, penataan ruang, litbang, infrastruktur, pemasar
- **Tingkat ekosistem:** DAS, kawasan konservasi, TN, atau wilayah khusus. \Rightarrow visi keberlanjutan, interaksi sistem produksi, pembatasan wilayah, trekking
- **Tingkat mikro:** komunitas dan ekonomi lokal, desa, budaya lokal. \Rightarrow partisipasi, multiplier, produk dan jasa, ruang

Perencanaan Wilayah Ekowisata

Tujuan Manajemen:
Kemana akan menuju

Review Manajemen:
Kebutuhan apa yang
diperlukan

adjustment?

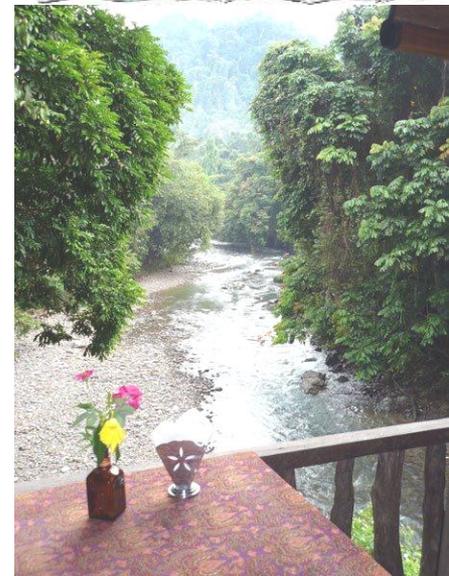
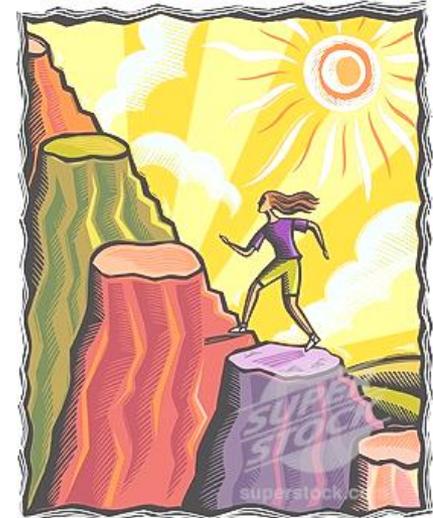
Bukti lapangan

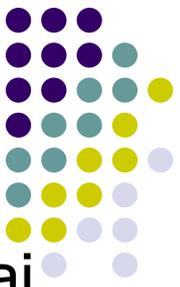
Evaluasi:
Sampai dimana?
Apa yang sudah
diperoleh

Manajemen Aksi:
Bagaimana
mencapai tujuan

Siklus perencanaan manajemen ekowisata

Universitas Widyagama Malang



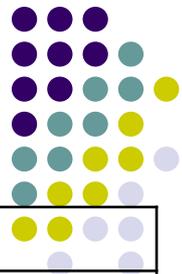


Perencanaan Manajemen

- Faktor ekologi dan sosial merupakan dasar bagi berbagai pemanfaatan dan menjadi dasar tatanilai pengelolaan.
- Organisasi manajemen ditujukan untuk melindungi tatanilai asli saat area dikembangkan.
- Produk atau jasa ekowisata memiliki karakteristik lokal dan khas dan berbeda dengan jasa pariwisata umumnya.
- Karakteristik layanan jasa ekowisata terletak pada kualitas, pengendalian dan manfaat (*high quality, low volume* dan *high value added*).
- Perencanaan manajemen hendaknya berada dalam konteks pengembangan wilayah
- Perencanaan manajemen ekowisata pada dasarnya adalah berjangka panjang.



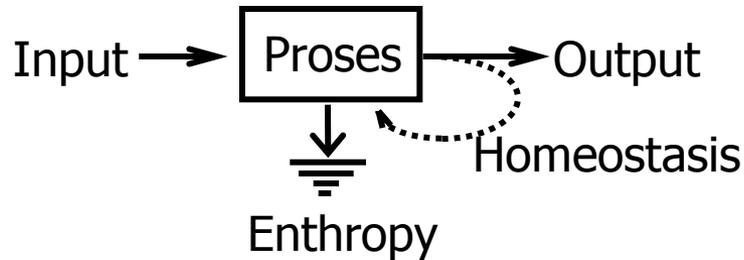
Klasifikasi Fungsi Sumberdaya Alam dan Lingkungan



Nilai kegunaan	Total Economic Value				
	Nyata (Use Value)			Tidak Nyata (Non-use Value)	
Ragam kegunaan	Langsung (Direct Use Value)	Tidak Langsung (Indirect Use Value)	Akan datang (Option Value)	Warisan (Bequest Value)	Keberadaan/kekekalan (Existence Value)
Manfaat kegunaan	Dikonsumsi langsung (Output can be consumed directly)	Dikonsumsi fungsinya (Functional benefit)	Dikonsumsi kelak (Future direct and indirect use value)	Untuk antisipasi manfaat ke depan (Value of leaving use and non-use values for spring)	Untuk ilmu pengetahuan dan moral (Value from knowledge of continued existence based on ,e.g. moral moral conviction)
Jenis sumberdaya atau komoditi	produk dan jasa ekonomi (food, biomass, recreation, health)	Fungsi-2 ekologi, iklim dan tata air (ecological functions, flood control)	Keanekaragaman hayati (biodiversity, conserved habitat)	Sumberdaya yang tidak pulih (habitat, irreversible changes)	Sumberdaya yang langka/punah/terancam siklus hidupnya (habitats, endangered species)
	Decreasing 'tangibility' of value to individuals →				



Perencanaan Wilayah Ekowisata



Pendekatan Sistem

Perencanaan wilayah ekowisata dapat mengikuti pendekatan *enhancement macro sustainability*. Pada kondisi ini, terjadi interaksi antar industri yang menghasilkan multiplier yang tinggi dan distribusi manfaat.

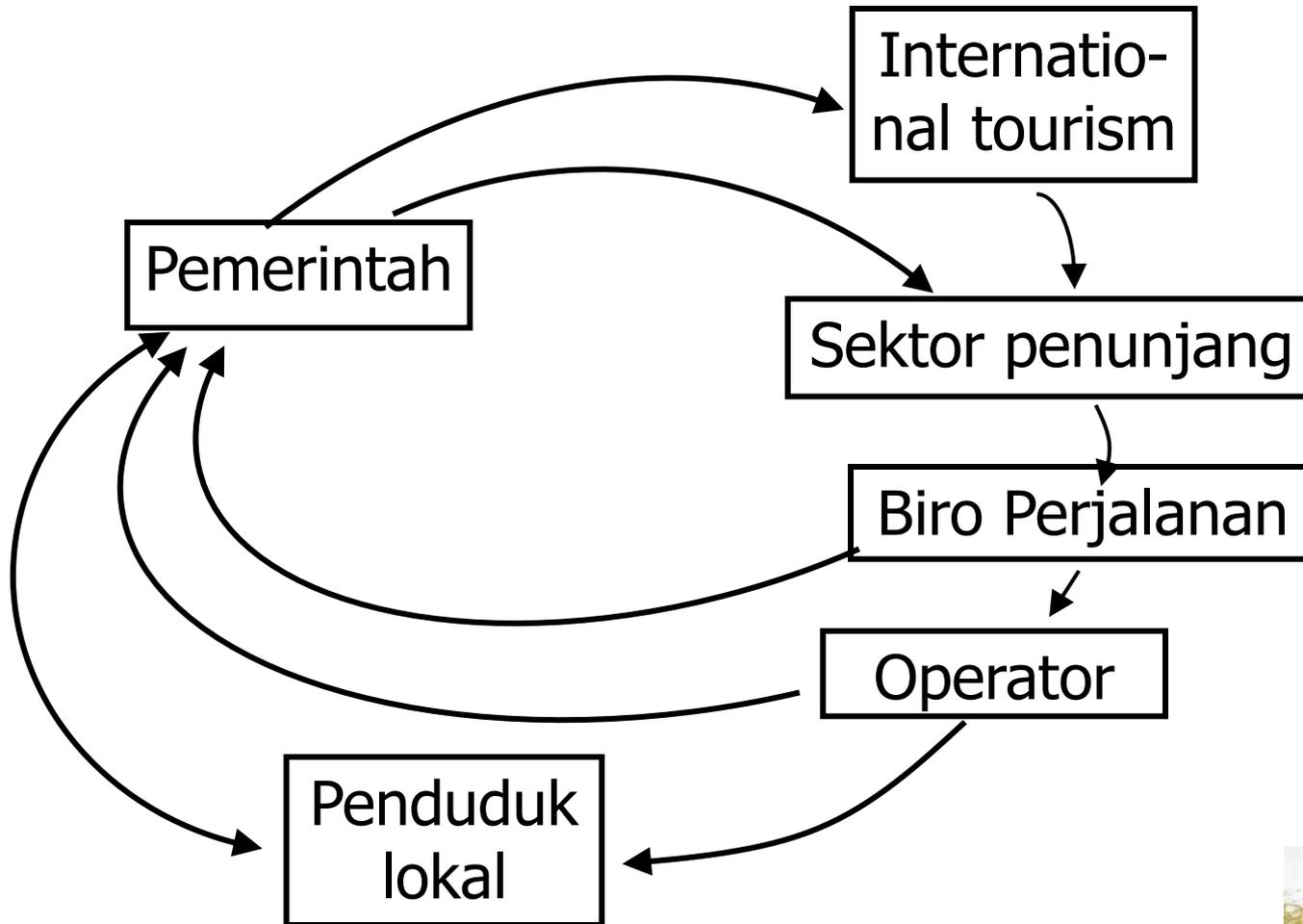
- **input** meliputi materi (siklus hara dan hidrologi), energi (bahan organik dan proses geologi) dan informasi (ilmu, teknologi, dan kearifan lokal) dari subsistem ekologi dan sosial yang lain.

- **Proses** = dipengaruhi tingkat perkembangan wilayah ekowisata. Wilayah yang berkembang, == memperlihatkan *share* sektor jasa, *division of labor* + partisipasi penduduk lokal, memuat unsur *manufacturing*, informasi, jasa asesori cinderamata, unsur pendidikan dan pelatihan lingkungan (*low volume, high quality* dan *high value added*).
- **output** berwujud pendapatan, kesempatan kerja, nilai tambah, pajak, devisa, informasi dan pengetahuan. Penerima output == penduduk lokal, pemerintah daerah, elit atau pengusaha, hingga pemerintah pusat
- **Entropy** meliputi kemiskinan, pencemaran lingkungan, perambahan hutan, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem dan rendahnya produktivitas wilayah.
- **Homeostasis** merupakan kebijakan dan program ekowisata, untuk memelihara keberlanjutan manfaat

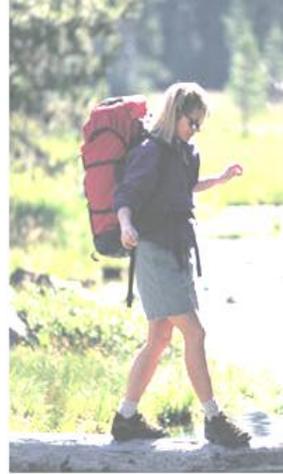


IV. ASPEK EKONOMI

KAITAN EKONOMI ECOTOURISM



Sektor ekonomi pendukung sektor ecotourism



ASPEK EKONOMI ECOTOURISM

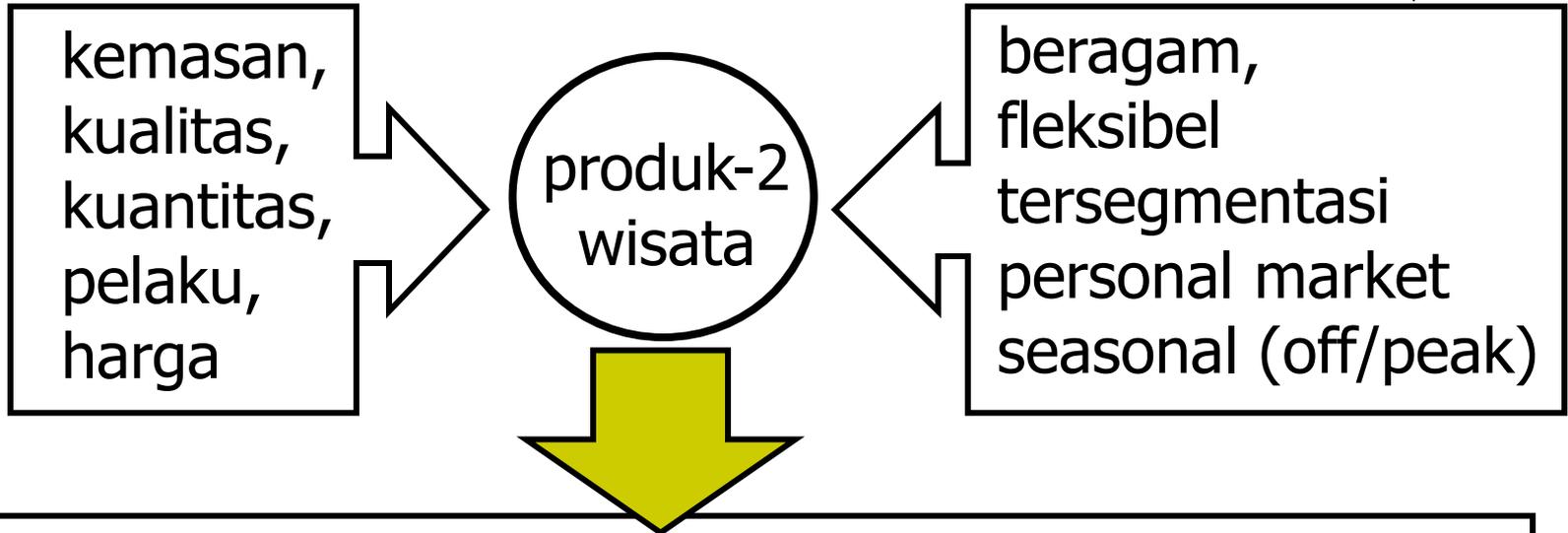
Manfaat ekonomi

- Devisa (lima besar komoditi ekspor)
- Percepatan pertumbuhan
- Tenaga kerja (dan pendapatan) pada berbagai sektor
- Kesejahteraan penduduk lokal (jasa pemandu, pemilik penginapan, driver, penjual cinderamata, atau jasa lainnya



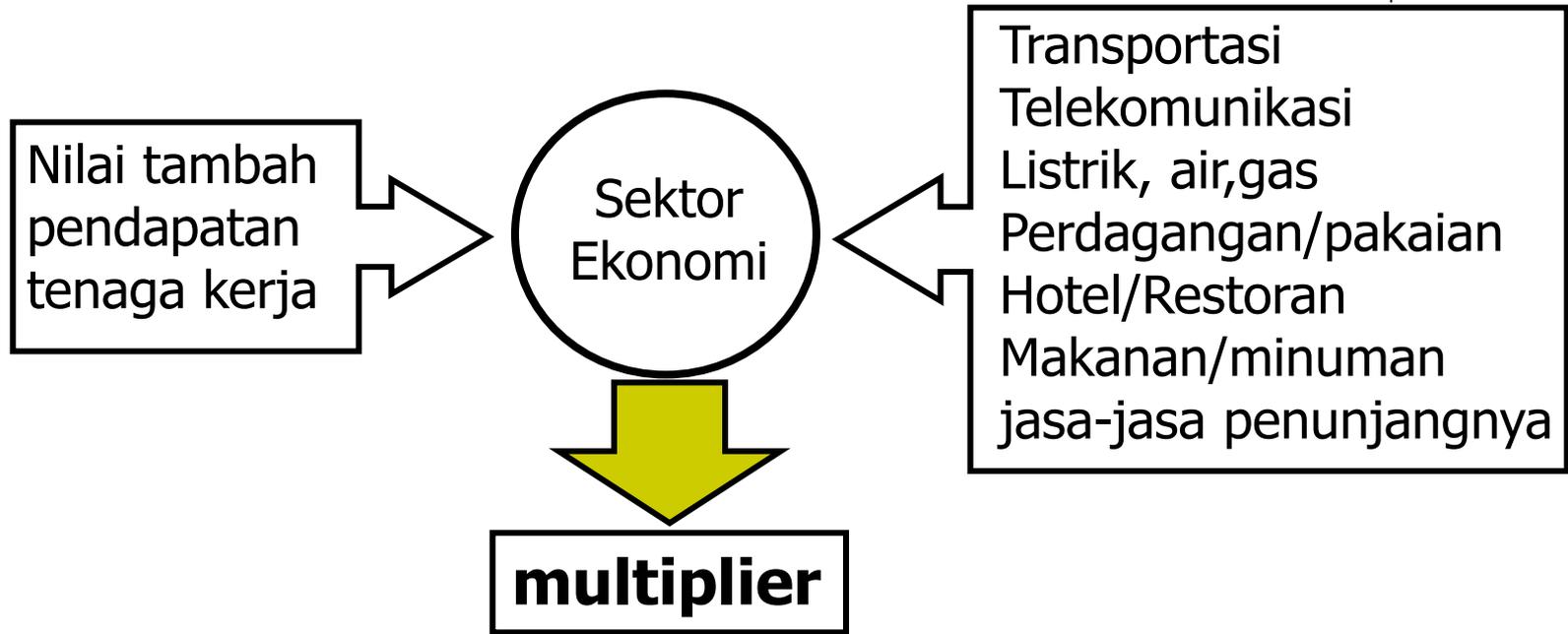


Aspek mikro



- (i) pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya, misalnya titik pengamatan atau sajian budaya;
- (ii) manfaat lansekap, misalnya jalur pendakian atau trekking;
- (iii) akomodasi, misalnya pondok wisata, homestay, restoran;
- (iv) peralatan dan perlengkapan, misalnya sewa alat penyelam dan camping; sleeping bed
- (v) pendidikan dan ketrampilan,
- (vi) penghargaan, yakni prestasi di dalam upaya konservasi.

Aspek makro



Income multiplier: jumlah uang yang dihasilkan pada suatu wilayah akibat tambahan pengeluaran turis sebesar satu unit.

Contoh: bila seorang turis mengeluarkan satu juta rupiah, hal tersebut menghasilkan tambahan income 800 ribu rupiah bagi penduduk wilayah lokal, maka nilai income multiplier adalah 0.8

Income multiplier ditentukan oleh:

- Jumlah dan Kualitas produk wisata
- Kebijakan: pajak, subsidi, keamanan



Produk dan Jasa Ekowisata (TN BTS)

No	Produk dan jasa	Keterangan
1	Pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya	flora dan fauna; lautan pasir, pengamatan matahari terbit; savana, ranu pane, ranu kumbolo, ranu regulo, air terjun (trisulo dan coban pelangi); budaya Tengger, upacara kasodo dan karo,
2	Manfaat lansekap	pendakian gunung Semeru, Bromo, Widodaren, Batok, offroad, trekking lautan pasir, trekking savana, para layang
3	Akomodasi dan fasilitas layanan pendukung	hotel, homestay, restoran, pondok wisata di Ngadisari dan Ranu pane, camping ground
4	Peralatan dan perlengkapan	Pemandu wisata, Sewa kuda, motor ojek, jip offroad
5	Pendidikan dan ketrampilan	Penelitian kearifan lokal,
6	Penghargaan, prestasi konservasi atau layanan	Tidak ada secara formal



TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU



Gunung Bromo

Ngadisari

Ranu Pane

Ngadas



1745 ft

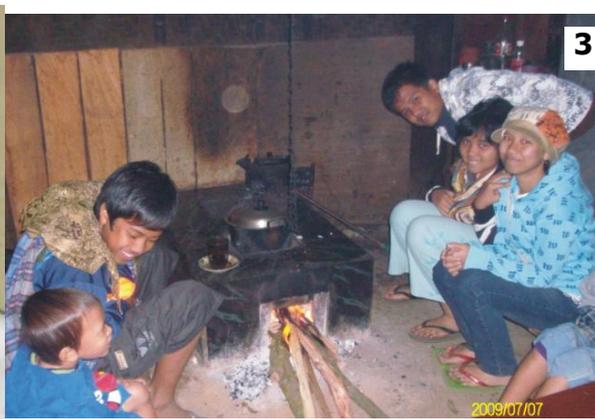
© 2009 Tele Atlas
© 2009 AND

© 2006 Google



Keterangan

1. Petani Ngadas bercocok tanam pada lereng tajam
2. Komoditi lokal Ngadas sangat eksotik
3. Jeep (offroad) dan kuda siap mengantar ke TN BTS
4. Pura hindu di lautan pasir Bromo
5. Masyarakat Ngadas perlu diberdayakan untuk mengelola jasa ekowisata
6. Lanskap Desa Ngadas (Google Earth)



Keterangan

1. Puncak Bromo
2. Pengunjung dan keluarga saling berkomunikasi (homestay di Ranu Pane)
3. Menghangatkan badan di dapur, adalah sajian yang menarik bagi pengunjung (homestay Ngadas)
4. Teknik pemanduan yang benar akan menghasilkan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung
5. Sajian makanan sederhana dari homestay



Produk dan Jasa Ekowisata (TN Meru Betiri)

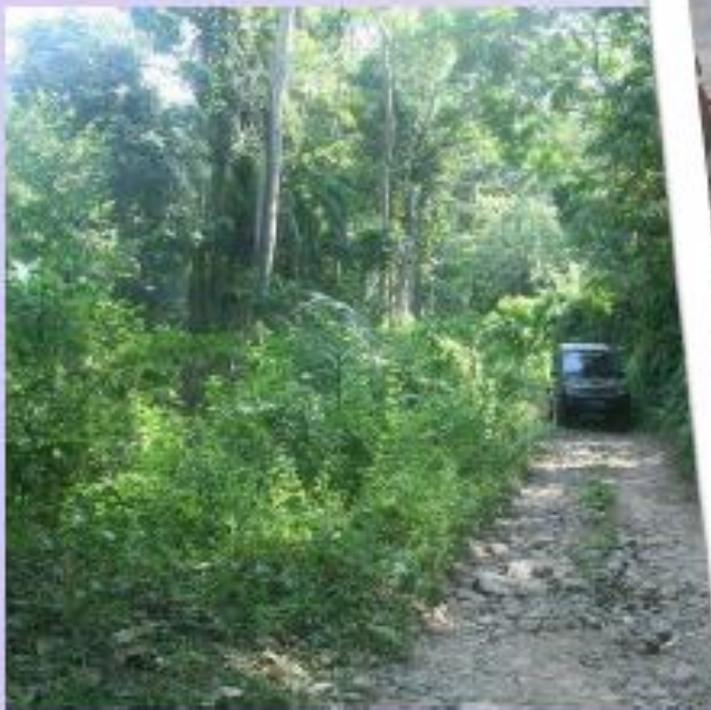
No	Produk dan jasa	Keterangan
1	Pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya	flora dan fauna; Gunung Meru Betiri, pantai Sukamade, Teluk Meru, Teluk Hijau, Teluk Permisian, Teluk Damai; habitat dan pembiakan penyu di pantai Sukamade, Pantai Rajegwesi
2	Manfaat lansekap	Menjelajahi hutan di sekitar Teluk Hijau. trekking Nanggalan-Bandealit (3 hari), trekking Bande Alit-Sukamade (3 hari), panjat tebing, wisata bahari, kampung nelayan tradisional
3	Akomodasi dan fasilitas layanan pendukung	Pondok wisata dan wisma peneliti, menara pandang, camping ground, dilayani MER (Masyarakat Ekowisata Rajegwesi)
4	Peralatan dan perlengkapan	Pemandu wisata, motor jagawana
5	Pendidikan dan ketrampilan	Penelitian pembiakan penyu, ekspedisi harimau jawa
6	Penghargaan, prestasi konservasi atau layanan	Tidak ada secara formal



TN Meru Betiri (Jawa Timur)



TN Meru Betiri (Jawa Tengah)



PROFIL
MERU
MAYORIKET EKOWISATA RAJAGWESI

Masyarakat Ekowisata Rajagwesi (MER) terbentuk pada tanggal 22 September 2017 dan bergerak di bidang ecotourism, di dalamnya terdapat 2 kelompok inti yaitu:

- 1. **Kelompok Home Stay**
dalam kelompok home stay terdapat 8 home stay yang mempunyai kapasitas menampung 20 wisatawan.
- 2. **Kelompok Pemandu Wisata**
dalam kelompok pemandu wisata terdapat 14 pemandu yang siap setiap saat memandu wisatawan baik asing maupun lokal menikmati keindahan obyek-obyek wisata yang di tawarkan di Rajagwesi.



Produk dan Jasa Ekowisata (Candirejo)

No	Produk dan jasa	Keterangan
1	Pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya	Bukit menoreh, watu kendil, sungai progo, tempuran, Borobudur, budaya Jawa, upacara Jumat kliwon
2	Manfaat lansekap	trekking bukit menoreh, rafting , lembah Borobudur,
3	Akomodasi dan fasilitas layanan pendukung	homestay, kantor koperasi desa wisata Candirejo
4	Peralatan dan perlengkapan	Pemandu wisata, DVT (dockart village tour), sepeda gunung,
5	Pendidikan dan ketrampilan	Pelatihan memasak tradisional Jawa, berlatih gamelan
6	Penghargaan, prestasi konservasi atau layanan	Tidak ada secara formal



Desa Ekowisata Candirejo, Kec. Borobudur, Magelang

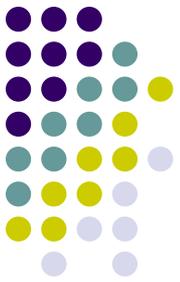


Desa Ekowisata Candirejo, Kec. Borobudur, Magelang

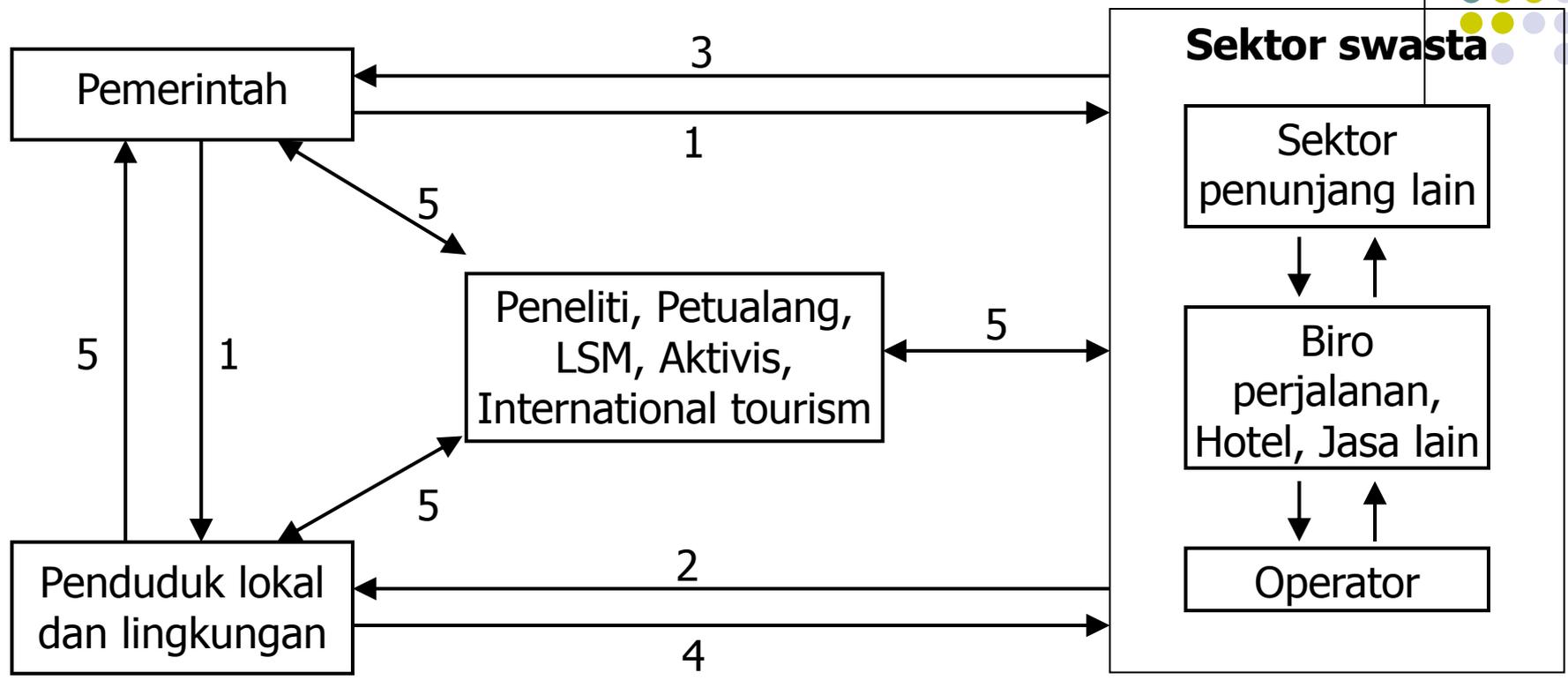
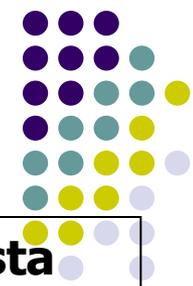


TN WAKATOBI





V. ASPEK SOSIAL

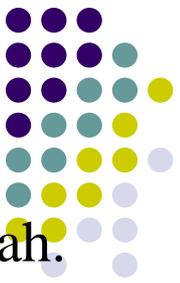


**Hubungan di antara stakeholder pada sektor ecotourism
(keterangan: 1=kebijakan; 2=pengunjung dan manfaat ekonomi;
3=pajak atau saran kebijakan; 4=partisipasi dan kenyamanan;
5=saran kebijakan**



Peran *stakeholder*

1. **Pemerintah.** Kebijakan fiskal meliputi perpajakan (dan tarif), investasi, infrastruktur, keamanan atau profesional aparat pemerintah.
2. **Sektor swasta:** keuntungan dari fasilitas dan akomodasi, informasi, produk wisata, tujuan wisata dan kualitas pelayanan, klub, dan saran policy.
3. **Pengunjung atau wisatawan:** aliran ekonomi, pengalaman, pendidikan lingkungan, nilai lokal, kepuasan, membentuk opini tentang lingkungan
4. **Penduduk lokal.** Subyek dan obyek ecotourism, kesejahteraan, kerangka berpikir penduduk lokal digunakan untuk saran kebijakan.
5. **Lembaga masyarakat.** memfasilitasi stakeholder yang terancam, advokasi, fungsi politis untuk mengangkat isu-isu kemiskinan, ketidakadilan dan dampak kerusakan lingkungan agar diperbaiki keadaannya.
6. **Kualitas lingkungan** (sumberdaya alam dan buatan) *ecotourism*. dampak thd *social welfare* (sosial, ekonomi dan lingkungan)





Penduduk lokal

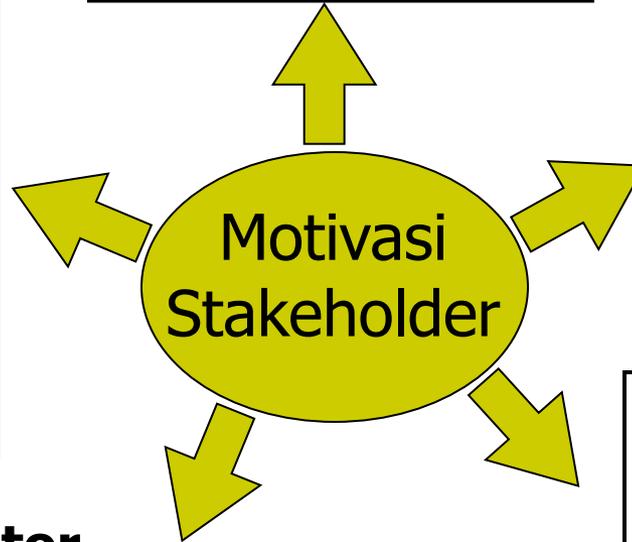
- Tambahan income
- Lapangan kerja
- Apresiasi thd lingkungan lokal, nilai budaya dan tradisi
- Akses ke pelayanan dan infrastruktur
- Meningkatkan harga dan kepercayaan diri

Akademisi, petugas TN

- Konservasi dan warisan budaya,
- Pendapatan
- Lapangan kerja
- Kemitraan dg penduduk lokal
- Sharing informasi dan belajar
- Pengelolaan SDA dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan
- Kegiatan penelitian
- Jumlah kunjungan dan pengalaman yang sensasional

Masyarakat luas

- Redistribusi kesejahteraan
- Bisnis lokal: sumberdaya lokal, tenaga kerja, ekspor,
- Kualitas hidup dan kesehatan
- Konservasi alam (flora fauna), warisan dan identitas budaya,
- Peningkatan kesadaran masyarakat, pembelajaran, global awareness
- Pengembangan masyarakat



Pengunjung, wisatawan

- Pengalaman (kognitif, afektif dan psikomotorik)
- Kepuasan individu, kesehatan
- Pengalaman sosial: dg penduduk lokal, sesama pengunjung, team building,
- Promosi perihal konservasi dan perlindungan
- Pengetahuan tentang tata nilai, penghargaan, nilai-nilai sejarah

Operator

- Keuntungan
- Pengembangan pasar dan produk
- Kreativitas produk dan layanan
- Membantu pemahaman pengunjung terhadap sumberdaya alam



2. Perencanaan

- Menyajikan proses pengambilan keputusan
- Mengidentifikasi stakeholder dan masyarakat lain
- Menentukan kebutuhan informasi
- Mengklarifikasi tujuan keterlibatan publik



1. Keterlibatan Awal

- Konsultasi informal utk mengembangkan isu
- Memperkirakan partisipasi atau interest dari stakeholder
- Mengidentifikasi identifikasi kunci

Panduan Partisipasi Stakeholder

3. Pengembangan partisipasi

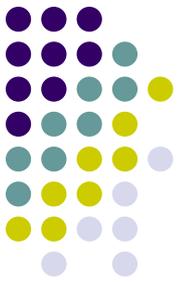
- Memilih metode partisipasi publik secara rinci
- Mengembangkan komunikasi internal
- Berkomitmen terhadap konservasi sumberdaya
- Menyusun skedul dan tugas-tugas

5. Partisipasi pasca program

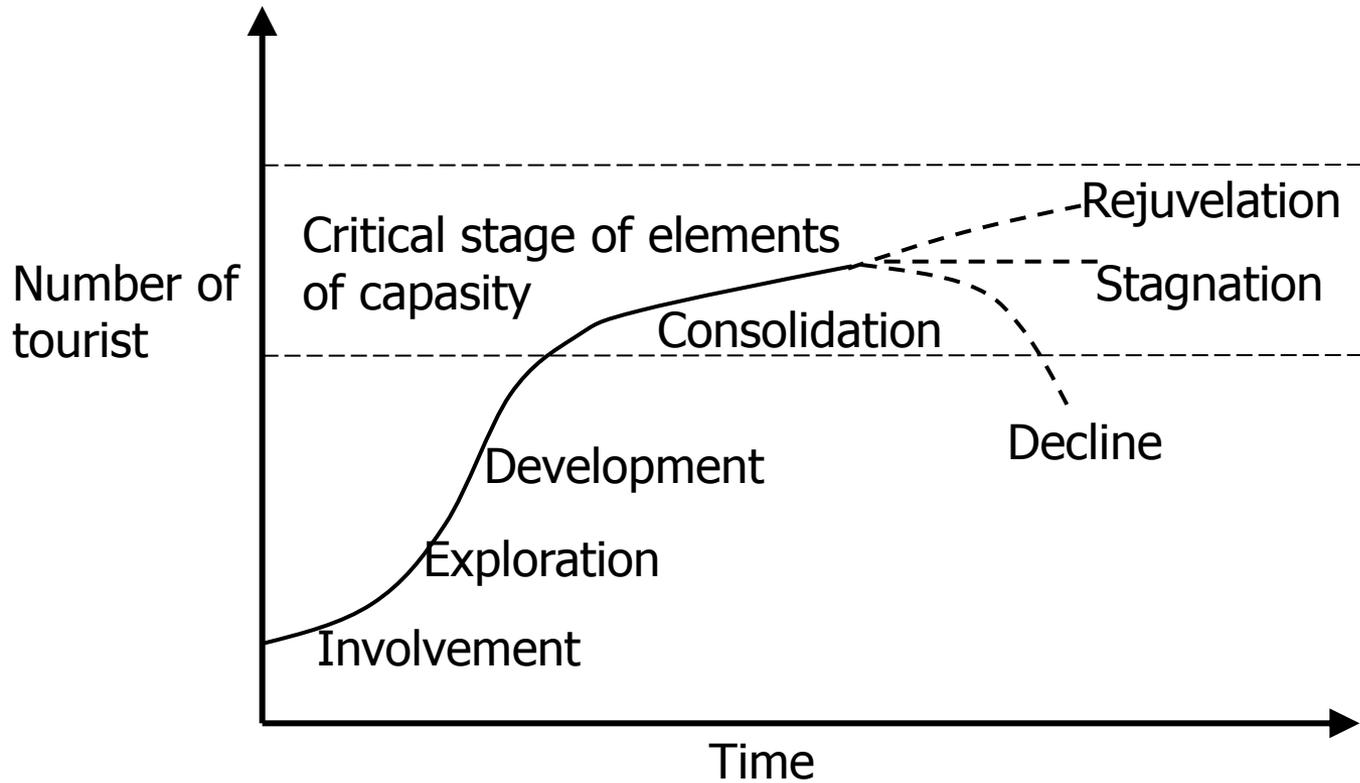
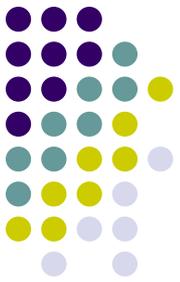
- Mengembangkan aspirasi (pendapat atau catatan kritis) pasca program
- Melaksanakan perubahan kegiatan bila perlu

4. Implementasi program

- Melaksanakan program
- Memonitor partisipasi publik dalam program
- Mengevaluasi hasil-hasil keterlibatan publik



VI. ASPEK LINGKUNGAN



Hubungan antara waktu dan jumlah wisatawan





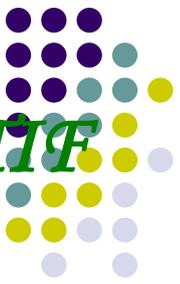
1. DAMPAK LOKAL

- **Pengurangan/penipisan sumberdaya alam:** jumlah air baku, cadangan air tawar, produksi limbah, energi, makanan, atau bahan lain.
- **Polusi** emisi, kebisingan, sampah, limbah, minyak dan bahan kimia, atau gangguan pemandangan (mengkontribusi sekitar 60 persen dari moda transport udara)
- **Dampak Fisik : selama konstruksi (sedimentasi, debu, kompaksi tanah); aktifitas wisata (biodiversitas, siklus organisme)**

2.DAMPAK GLOBAL: kehilangan *biodiversity*, *biopirate*, menipisnya lapisan ozon dan perubahan iklim global.

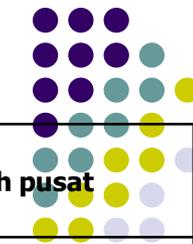
3.PENGARUH INDUSTRI LAIN: Kebocoran minyak, Pertambangan (tailing), Industri manufaktur *heavy* atau *polluted industry* (seperti petrokimia, baja, minyak, tekstil, kayu),

Dampak POSITIF

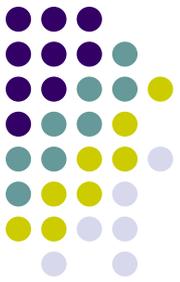


- **EKONOMI:** pertumbuhan, devisa, membeayai program-program konservasi, penelitian dan pembangunan infrastruktur
- **PERENCANAAN YANG KOMPREHENSIF:** perilaku efisien, bersih, dan aman di dalam manajemen produksi (*good corporate government*).
- **PENINGKATAN KESADARAN LINGKUNGAN:** mempengaruhi perilaku memahami aliran input, proses dan output. kerangka konservasi lingkungan (*environmentally sustainable way*) sejak dari lahir hingga mati (*from cradle to grave*).
- **PERLINDUNGAN SPESIES TERANCAM**
- **KESEMPATAN KERJA:** menyebar kepada seluruh sektor (tidak bertumpu ke SDA)
- **REGULASI :** Aturan ambang batas, code of conduct

Dampak Perambahan Hutan terhadap Aktivitas Ekonomi, Lingkungan dan Stakeholder di Wilayah Ekosistem TN Gunung Leuser



Dampak kegiatan/industri	Penduduk lokal	Pemerintah daerah	Kelompok elit, pengusaha	Pemerintah pusat
Air bersih	Kenaikan harga air	Beaya perbaikan sistem distribusi air		Beaya perbaikan sistem distribusi air
Perikanan	Penurunan pendapatan nelayan	Kehilangan pajak		Kehilangan pajak
Bencana banjir	Kerusakan rumah	Kerusakan infrastruktur	Kerusakan jalan, pemberian kompensasi	Pengerahan bantuan sosial
Pertanian	Kenaikan harga komoditi dan penurunan produksi	Kehilangan pajak	Penurunan produksi tanaman kebun	Kehilangan pajak
Tenaga Listrik	Produktivitas menurun akibat kenaikan tarif listrik (biaya pembangkit naik)	Kehilangan pajak	Kehilangan pendapatan dari listrik	Kehilangan pajak
Wisata, termasuk ekowisata	Kehilangan pendapatan	Kehilangan pajak	Kehilangan pendapatan dari wisata	Kehilangan pajak dan devisa
Keanekaragaman hayati		Kehilangan devisa	Kehilangan manfaat dari industri obat-obatan	Kehilangan devisa
Emisi karbon		Kehilangan devisa		Kehilangan devisa
Kebakaran hutan	Kerusakan tanaman, bangunan, gangguan kesehatan	Kerusakan infrastruktur	Kehilangan konsesi hutan/kebun	Kehilangan pajak
Produk non kayu	Menuntungkan dlm jangka pendek, merugikan dlm jangka panjang	Kehilangan pajak	Menuntungkan dlm jangka pendek, merugikan dlm jangka panjang	
Kayu	Menuntungkan dlm jangka pendek, merugikan dlm jangka panjang	Kehilangan pajak	Menuntungkan dlm jangka pendek, merugikan dlm jangka panjang	Kehilangan pajak dan devisa



VII. MANAJEMEN OPERASIONAL

Empat isyu konservasi dalam MANAJEMEN EKOWISATA



- Kegiatan wisata yang cenderung berkarakter massal (*mass tourism*).
- Obyek ekowisata yang spesifik. sumberdaya lokal secara kreatif sesuai daya dukung lingkungan
- Pemberdayaan penduduk lokal, memberikan kesejahteraan, meningkatkan martabat.
- Penelitian dan pengembangan: identifikasi nilai-nilai dan potensi dan manfaat bagi konservasi dan ekowisata, misal keanekaragaman hayati, warisan budaya, flora dan fauna lokal



Proses keterlibatan publik dalam manajemen plan ekowisata

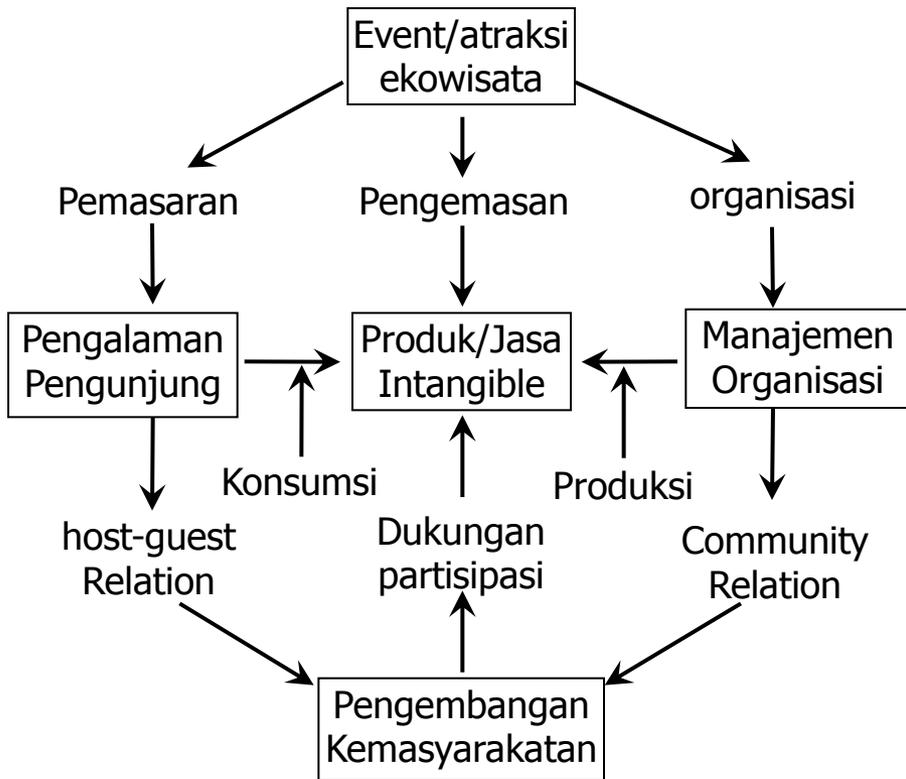


Pendekatan	Deskripsi	Teknik	Isi pesan kepada publik
Informasi dan pendidikan	Pengetahuan tentang keputusan	Iklan	Publik perlu mengetahui dan memahami
		Berita surat kabar	
		Poster	
Umpan balik Informasi	Mendengar informasi sebelum pengambilan keputusan	Berita ringkas, selang pandang	Publik memahami dan mendukung program
		Fokus group	
Konsultasi	Mendengar informasi sebelum pengambilan keputusan	Rapat dan pembahasan bersama	Publik perlu memahami, memberikan input dan evaluasi
		Konferensi	
		Lokakarya, pertemuan pemecahan masalah	
Partisipasi/ keterlibatan	Memiliki informasi tentang pengambilan keputusan	Badan pertimbangan	Publik perlu mengetahui bahwa pendapatnya diperhatikan dan diimplementasikan
		Tim pelaksana/gugus tugas	
Perencanaan bersama	Mengerti dan menyetujui pengambilan keputusan	Konsultasi	Publik perlu memahami bahwa pengambilan keputusan berhadapan dengan keterbatasan
		Mediasi	
		Negosiasi	

Manajemen Operasional



- **Tujuan wisata:** rute, jadwal dan moda transportasi dan latar belakang sosial
- **Produk wisata** (ada 6 jenis). Produk ekowisata mencakup perihal materi (*theme*), akomodasi dan suvenir.
- **Promosi:** menjelaskan jadwal kunjungan, jumlah anggota (minimal) rombongan, jumlah antrian, jumlah akomodasi, dan kemampuan penduduk lokal
- **Pengendalian rombongan.** Karakteristik jumlah pengunjung rendah (*low volume*), pelayanan berkualitas (*high quality*) dan nilai tambah yang tinggi (*high value added*).
- **Sikap dan partisipasi penduduk lokal:** *enterpreneurship*, terbuka dan toleran, sikap ramah, ikhlas dan jujur sesuai nilai-nilai tradisi.



Sistem manajemen operasional



Ekowisata dan keberlanjutan



Manajemen Tujuan Ekowisata



- **Karakteristik tujuan wisata:** (i) bersifat peka dan terancam (*fragile and endangering*); (ii) penggunaan bersama (*share with other user*); (iii) memuat nilai-nilai kultural dan warisan budaya.
- **Interpretasi:** adalah program yang terkait dengan pemahaman obyek yang dikunjungi secara seksama sehingga timbul suatu relasi positif antara manusia dengan obyek/alam tersebut. Manfaat interpretasi: (i) pengunjung dapat menentukan sikap terhadap pengelolaan tujuan wisata dan dampak-dampaknya. (ii) membantu mengendalikan laju kunjungan, (iii) memahami pembangunan wilayah.
- **Perencanaan pengembangan tujuan wisata:** tema, media dan proses monitoring terhadap produk jasa wisata.

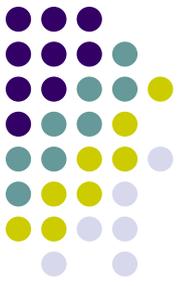
Akreditasi dan Sertifikasi



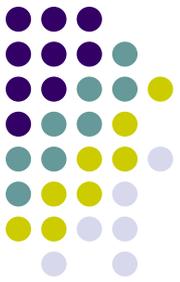
Standart mutu layanan ekowisata adalah berupa sertifikasi mutu dengan spesifikasi kriteria tertentu. Beberapa program sertifikasi antara lain (Eagles et al., 2002):

- Green Globe 21, terdiri tahapan: *Afiliasi, Benchmarking, Certifying*
- VISIT adalah program sertifikasi untuk kebanyakan negara-negara Eropa bagi pengembangan ekolabel dan *sustainable tourism*.
- Sertifikat hijau (*Green Certificate*, Latvia).
- Nordic Ecolabelling (negara skandinavia),
- Certification for Sustainable Tourism (Costa Rica),
- Ecotel (HVS International).

TUGAS



1. Kumpulkan promosi program Ekowisata dari Internet, 5 lokasi tujuan ekowisata: 3 domestik, 2 luar negeri
2. Kumpulkan materi tentang interpretasi dalam ekowisata (2 sumber)

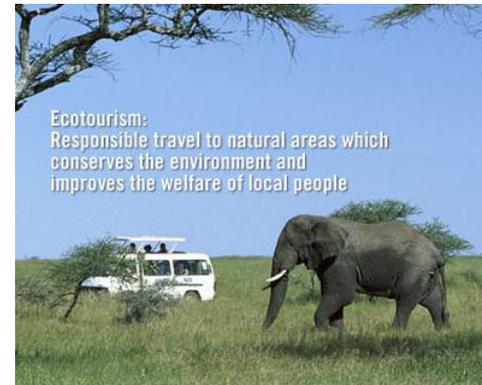


VIII. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

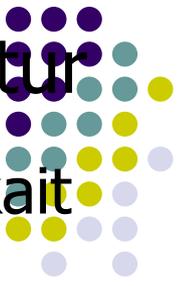
VIII. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Fungsi Infrastruktur

- metode akses atau aliran manfaat ekonomi
- manfaat sosial
- mendukung nilai-nilai konservasi lingkungan.
- aspek keamanan pengunjung serta pemeliharannya.
- daya tarik masuknya (investasi) operator atau sektor swasta



Panduan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur



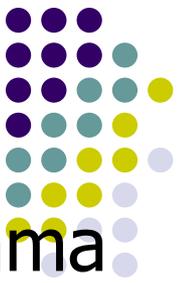
- Seberapa besar skala pengembangan infrastruktur? Terkait dengan jumlah pengunjung dan lama kunjungan.
- Apakah ada alternatif penggunaan infrastruktur?
- Bagaimana karakteristik lokasi yang akan dikonservasi?
- Berapa manfaat ekonomi bagi wilayah dan penduduk lokal?
- Seberapa jauh usulan infrastruktur akan membantu tujuan pembangunan wilayah ekowisata dan kehidupan tradisional?
- Apakah infrastruktur mempengaruhi lalu lintas yang sudah ada?
- Berapa tingkat permintaan pengunjung sesudah rencana pengembangan?
- Apakah fasilitas sejenis ada di tempat lain, bagaimana tingkat penggunaannya?
- Bagaimanakah manajemen dan pemeliharaan sesudah rencana pengembangan?

Pengendalian kunjungan melalui disain infrastruktur:

- Melaksanakan prinsip *low volume, high quality* dan *high value added*.
- Mendukung program pelatihan dan ketrampilan,
- Interaksi antara pengunjung dan penduduk lokal
- Menghasilkan interpretasi dan partisipasi untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi lingkungan



Sarana fisik ekowisata yang penting



- Pusat informasi (*visitor centre*), pengendali utama dan awal prosedural pengelolaan meliputi tata tertib, kode etik, program-program, dan resiko-resiko dan antisipasi keselamatan
- Penginapan (*camp site*) disain simpel, mudah penggunaannya dan minimum waste
- Akomodasi: (i) mudah dikendalikan oleh pengelola, (ii) tidak mengganggu konsentrasi atau mengurangi perhatian pengunjung terhadap manfaat lingkungan, dan (iii) tidak mengurangi sensasi petualangan

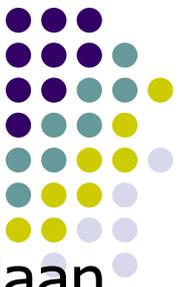


Pendekatan kultural dalam pembangunan infrastruktur:



- Menyesuaikan dengan karakter warisan budaya. Disain/konsep pembangunan disesuaikan dengan karakter lokal, nilai-nilai lokal, dan bermakna *sustainability* manajemen.
- Sejalan dengan nilai-nilai lokal **plus** nilai-nilai kontemporer, **plus** teknologi baru yang simpel, efektif, smart, misal mikrohidro, *solar energy*, hemat energi.
- Memperhatikan *setting* infrastruktur dan bangunan secara teliti: aliran program, keamanan, dan akses terhadap penduduk lokal
- Melibatkan penduduk lokal dalam menemukan solusi arsitektur.

Pendekatan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur:



- Meminimalkan dampak lingkungan: memadukan pengelolaan tanaman (*tree management*) vs perubahan fisik. Implementasi detil pengelolaan lingkungan (studi Amdal)
- Menciptakan kesan/sensasi kepada pengunjung. Kreasi disain lokal: warna, bahasa, simbol/ atribut lain. Interior alam terbuka, mandi pancuran, sajian makanan rebus
- Mendisain infrastruktur yang *environment friendly*. Harmonisasi fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan. Letak pemukiman penduduk lokal, jalur pendakian, dan program interpretasi,
- Memberikan pendidikan, ketrampilan dan inovasi untuk konservasi. Infrastruktur dari teknologi lokal, plus paduan teknologi modern, teknik tali-temali, anyaman, mebeler dan bahan bambu atau kayu lokal



TRANSPORTASI

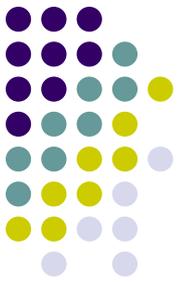
Manfaat

- Kepuasan pengunjung,
- Kepentingan *sustainability* pengelolaan ekowisata.
- Memberikan pengalaman yang sensasional
- Melindungi flora-fauna dan keselamatan pengunjung

Kerugian

- Polusi, kebisingan, debu,
- Kerusakan vegetasi
- Pencemaran air.

Jalan menuju **TN Bromo Tengger Semeru** (TN BTS) melewati desa Ngadas, didisain menggunakan makadam beton. Lebar jalan hanya 3 meter sehingga kendaraan yang berpapasan harus berhenti lebih dulu. Bisa saja jalan dibuat dari aspal, namun proses konstruksinya akan mengganggu lingkungan akibat asap aspal, atau kompresi alat-alat berat. Jalan yang dibangun sejak 1997 tersebut, memang hanya layak untuk kendaraan *off-road* seperti jip atau truk yang didisain khusus. Jalan tidak hanya untuk kenyamanan dan akses pengunjung, tetapi juga untuk lalulintas ekonomi penduduk Tengger di Ngadas sebagai penghasil hortikultura. Lebih dari itu, jalur dari barat melalui Ngadas menuju TN BTS dapat mengurangi kepadatan jalur utara melalui Ngadisari, sekaligus mengurangi kerentanan daya dukung TN BTS secara keseluruhan. Pengelolaan jasa transportasi jip atau kuda hanya diberikan kepada penduduk lokal Tengger agar mereka memiliki kesempatan berinteraksi lebih banyak dengan jasa wisata.



IX. SUMBERDAYA MANUSIA

IX. SUMBERDAYA MANUSIA



- SDM bertanggungjawab dalam pengelolaan jasa ekowisata berkelanjutan.
- Jagawana, pemandu, atau penduduk lokal adalah pintu terdepan pengembangan ekowisata Hubungan yang baik antara pekerja ekowisata dan pengunjung akan menghasilkan pengalaman dan manfaat (*sustainable benefit*) yang signifikan.
- Program dapat berperan sebagai kendaraan yang membawa sumberdaya manusia kepada peningkatan harkat dan martabat di dalam jasa ekowisata.
- Lingkungan eksternal meliputi peluang, ancaman dan pasar; serta tantangan kebijakan pemerintah mencakup regulasi, stabilitas politik dan dampak global, perlu dikelola agar menghasilkan manfaat bagi pengembangan ekowisata

Job analysis adalah identifikasi kebutuhan SDM organisasi melalui proses-proses pengumpulan informasi, evaluasi kerja dan ditransformasikan ke dalam kinerja spesifik individual.



Kegiatan *job analysis* meliputi:

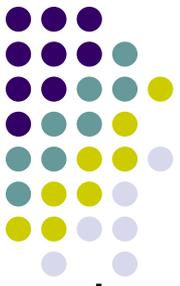
- Keluaran (*work outcomes*), misalnya: kunjungan, *length-stay*, pengeluaran wisatawan; keuntungan atau pendapatan penduduk.
- Prosedur (*work procedures*), memuat prinsip-prinsip *what, where, when, who* dan *how* perlindungan wilayah ekowisata
- Sarana dan prasarana (*equipment and tools*), membantu efisiensi manajemen, program2 pendidikan/ketrampilan dan interpretasi.
- Lingkungan kerja, seperti kebersihan, pencahayaan, disain, menghasilkan produktivitas dan kenyamanan psikologis saat program pendidikan dan interpretasi
- Spesifikasi kerja (*job specifications*), mencakup pengetahuan/ketrampilan, komunikasi dan interpretasi, prosedur, sikap, kecepatan layanan

Trilogi Sumberdaya Manusia

Ke dalam		Ke luar		
Substansi	Pelaksana	Domain	Unsur	Sasaran pengembangan ekowisata
<i>Fuels</i> (kompetensi)	<i>Passenger</i> (pekerja)	Hardside (kompetensi eksternal)	Pendidikan	Formal dan non-formal
			Skill (ketrampilan)	Interpretasi
			Pengalaman	Budaya lokal
		Softside (kompetensi internal)	Sikap	Berpikir positif untuk konservasi
			Perilaku	Produktif, terukur dan efisien
			Kebiasaan	Pelayanan cepat, tepat, jujur
<i>Engine</i> (program-program)	<i>Vehicle</i> (perusahaan)	Hardside (kemampuan stakeholder)	Modal	Perbankan atau individual
			Finansial (cash flow)	Manajemen efisien
			Nilai tambah	Keuntungan dan kesejahteraan
		Softside (kemampuan manajemen)	Misi dan strategi	Konservasi dan kesejahteraan
			Pengembangan karir	Program pengembangan SDM
			Budaya bisnis	Harmoni, kompetensi
<i>Panel</i> (Lingkungan eksternal)	<i>Field</i> (bisnis)	Hardside (tantangan bisnis)	Peluang pengembangan usaha	Pendidikan, yang mengutamakan interpretasi
			Ancaman kompetitor	Tidak ada, saling kerjasama
			Segmentasi pasar	Well-informed people
		Softside (tantangan kebijakan pemerintah)	Regulasi/kebijakan pemerintah	Imigrasi, pajak, kebijakan investasi
			Ketidak-pastian	Politik, terorism
			Dampak global	Kesepakatan lingkungan global
Human resources management Universitas Widyagama Malang → People Development				

Sumber: Widyapratha (2006)

Kegiatan Manajemen SDM



1. Rekrutmen dan seleksi.

- Rekrutmen: proses memperoleh calon staf yang berkualitas untuk menduduki jabatan tertentu di dalam organisasi.
- Seleksi: keputusan memilih seseorang pada jabatannya.

2. Pengembangan SDM.

- Program pelatihan: (i) hubungan penduduk lokal dan pengunjung, (ii) *financial plan and business skill*, (iii) pendidikan lingkungan, (iv) resolusi konflik, (v) riset dan monitoring ekologi, (vi) penegakan hukum
- Pengembangan organisasi: program peningkatan kualitas kerja, *team building*, loyalitas dan komitmen.
- Pengembangan karir: pengembangan SDM dalam jangka panjang

3. Evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja diarahkan penguasaan kompetensi SDM, implementasi program, dan antisipasi perubahan lingkungan eksternal

Pendidikan Ekowisata

- Ditemui pada program studi D3 dan S1 di IPB Bogor, termasuk riset untuk S2 dan S3.
- Ditemui sebagai matakuliah pada program studi pariwisata, manajemen hutan, ekonomi lingkungan, atau agribisnis.
- Perguruan tinggi di luar negeri menyelenggarakan pendidikan ekowisata dengan kompetensi tinggi, misalnya di Belanda, pada program studi yang terkait dg service, tourism and leisure; hotel and tourism management; sustainable tourism and transport tourism; planning and development; dan leisure, tourism and environment.

Universitas Widyagama Malang



International Year of Ecotourism
2002

Program Pendidikan Ekowisata di Universitas George Washington, meliputi 8 pokok bahasan

1: Konsep ekowisata

- Konsep pariwisata, sustainable tourism dan ekowisata
- Industri, struktur pasar dan kecenderungan ekowisata
- Peran ekowisata dalam pembangunan masyarakat
- Peran ekowisata dalam konservasi keanekaragaman hayati
- Integrasi ekowisata dengan pengelolaan kawasan konservasi
- Kebijakan dan strategi pengembangan ekowisata

3: Pengembangan produk

- Pengantar pengembangan produk ekowisata
- Sasaran pasar dan pengembangan produk
- Inovasi produk (benchmarking, kemampuan bersaing)

Nexus with Marketing and Management

5: Disain proyek dan manajemen

- Prinsip manajemen proyek
- Perencanaan proyek
- Implementasi proyek
- Software manajemen proyek
- Manajemen resiko
- Monitoring dan evaluasi
- Manajemen perubahan

7: Pembiayaan

- Akses pembiayaan
- Penyusunan dan pengembangan proposal
- Sumber pembiayaan-multi dan bilateral, anggaran pemerintah, yayasan dan swasta.
- Kemitraan dan *joint venture*

2: Asesmen

- Dasar-dasar asesmen
- Keterlibatan stakeholder
- Analisis atraksi, situs/tempat, dan infrastruktur
- Analisis permintaan pasar
- Penyediaan jasa dan kompetisi
- Kebutuhan dan kapasitas sumberdaya manusia
- Pertimbangan sosial ekonomi dan budaya
- Ukuran ekowisata dan keanekaragaman hayati
- Konservasi dan dampak lingkungan
- Rekomendasi dan pelaporan

4: Pemasaran

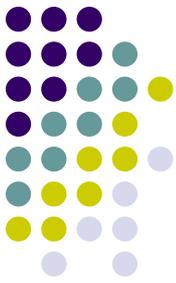
- Motivasi konsumen
- Image tujuan ekowisata dan perilaku konsumen
- Segmentasi dan sasaran pasar
- Positioning, mapping & branding, kemitraan, pricing, promotion, place, dan saluran distribusi
- Monitoring dan evaluasi
- Pemasaran online dan manajemen database

6: Pilihan (salah satu)

- Perencanaan usaha
- Ekowisata pesisir dan laut
- Pembangunan pondok wisata (*ecolodge*)
- Manajemen lingkungan dan aspek sosial
- Tanggungjawab wilayah tujuan
- Keselamatan dan keamanan
- Wisata warisan budaya
- Manajemen gelar kegiatan

8: Pelatihan – pengantar menjadi pelatih

- Perilaku pembelajaran
- Teknik mengajar
- Integrasi berbagai aktivitas
- Mengelola kursus





Di sekitar wilayah TN Kerinci Seblat, dikembangkan program muatan lokal dalam kurikulum pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk itu, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci telah menyusun Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang memuat materi perihal TN Kerinci Seblat dan Pariwisata Alam Kerinci. Atas persetujuan Dinas Pendidikan Propinsi, muatan lokal tersebut juga diterapkan di kabupaten Sarolangun Bangko dan Bungo Tebo. Pada saat yang sama, Bappeda propinsi Jambi mengusulkan agar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pariwisata Alam Jambi dapat menjadi muatan Lokal bagi siswa SLTP di seluruh Propinsi Jambi (Siswanto, 1998).

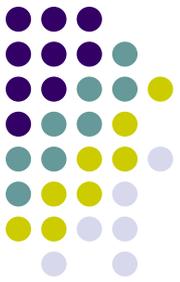
Pendidikan konservasi di TN Gunung Gede Pangrango (Sunaryo, 1998) :

- Perkemahan konservasi yang terjadwal dua kali dalam setahun. Sasarannya adalah murid sekolah SLTP dan SLTA di sekitar TN dengan jumlah antara 40 sampai dengan 50 orang setiap angkataannya.
- Program School Visit di Cibodas dan Selabintana. Program ditujukan untuk murid sekolah dasar disekitar Taman Nasional.
- Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol, kerjasama TNGGP dengan Conservancy International-Indonesia Program, dan Yayasan ALAMI.



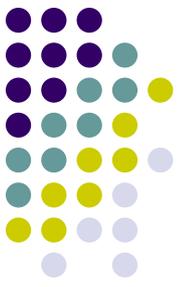
LSM Indecon (www.indecon.or.id) menyajikan training:

- Pelatihan untuk pelatih (*training for the trainers*); diselenggarakan selama sepuluh hari dengan materi perencanaan, pengembangan dan monitoring
- Pelatihan perspektif (*perspective training*); diselenggarakan empat hari dengan materi dasar dan pengetahuan ekowisata.
- Pengembangan dan pemasaran (*development and marketing*); diselenggarakan tiga hari dengan materi perencanaan dan pengembangan disertai study visit.
- Pelatihan interpretasi (*interpretation training*); diselenggarakan dua hari dengan materi pengetahuan dan ketrampilan interpretasi.
- Pelatihan pemandu (*guide training*); dilaksanakan empat hari dengan materi perihal pengetahuan dan ketrampilan pemanduan
- Pelatihan dan ketrampilan lapangan (*field practice training*); diselenggarakan selama tujuh hari yang memuat materi tentang partisipasi masyarakat, bisnis dan interpretasi



X. EKOWISATA DI NEGARA LAIN

Australia



- Australia memiliki industri jasa pariwisata yang maju, menyumbang 5.5 persen PDB, 8 persen tenaga kerja dan 12 persen nilai ekspor.
- Orang asing masuk Australia: 62 persen utk berlibur, 18 persen utk kunjungan keluarga, dan 11 utk persen bisnis; sekitar 46 persen dari mereka mengunjungi taman-taman nasional dan kebun raya.
- Australia memiliki spesifikasi ekowisata yang khas. Negara ini memiliki daratan dan perairan khas, luas dan beragam dengan lansekap dan sisekap (*seascape*) yang indah. Kawasan konservasi mencakup 6.4 persen luas total daratan.
- Pada tahun 1994, Australian Commonwealth Department of Tourism telah menyusun kerangka konseptual pengembangan ekowisata. Dengan visi: *mengembangkan industri ekowisata yang bergairah di dalam negeri dan kompetitif secara internasional. Ekowisata Australia juga akan mengembangkan mutu lingkungan di tingkat internasional dan keunikan kultural dalam rangka menghasilkan manfaat ekonomi dan konservasi.*



Australia

Strategi nasional pembangunan berkelanjutan (*National Strategy for Ecologically Sustainable Development*), dan pengembangan nasional ekowisata, (Preece and van Oosterzee, 2004):

1. Perlindungan keanekaragaman hayati dan memelihara proses-proses dan sistem ekologi.
2. Perbaikan koordinasi dan integrasi diantara semua pihak: pemerintah, industri dan kelompok masyarakat
3. Perencanaan yang lebih baik untuk antisipasi pengambilan keputusan
4. Monitoring dan pengembangan indikator kinerja
5. Penyebaran informasi atau kebijakan baru
6. Implementasi sistem aturan, standar mutu dan instrumen ekonomi
7. Evaluasi dan analisis benefit dan cost lingkungan, sosial dan ekonomi
8. Mekanisme pertanggungjawaban publik.



Brazil



- Di hutan Amazon, ada sekitar lima juta hektar area yang alami dan asli, kaya dengan flora dan fauna eksotik, kaya keanekaragaman hayati, belum tersentuh infrastruktur, dan harus dilindungi.
- Tingkat kunjungan wisata (tahun 1998) mencapai 5 juta orang dan meningkat signifikan setiap tahun.
- Sejak tahun 1995, pemerintah Brazil telah mulai menyusun tim untuk menyusun *guidelines for an ecotourism national policy*.

Guidelines for an ecotourism national policy, dg 5 isyu

1. Pengembangan kapasitas dalam perencanaan sustainable tourism khususnya ekowisata
2. Peningkatan kesadaran dan pendidikan untuk mendukung ekowisata
3. Penggunaan kriteria-kriteria untuk pengelolaan ekowisata dan berbegat sarana penunjangnya
4. Program pengembangan kapasitas ekowisata
5. Kegiatan-kegiatan nyata dalam pendidikan lingkungan

Sektor riil pengembangan ekowisata berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan dan Kementerian Industri, Perdagangan dan Pariwisata. Dua kementerian ini telah menyusun panduan sebagai berikut

- membuat integrasi antara aktivitas ekowisata dengan konservasi sumberdaya alam
- memperkuat kerjasama internasional
- mengupayakan partisipasi aktif dan efektif semua sektor dalam jasa ekowisata
- mengangkat dan mendorong pengembangan kapasitas SDM
- mengangkat dan mendorong kreativitas dan perbaikan infrastruktur
- mempromosikan pengelolaan ekowisata sebagai komponen penting pendidikan lingkungan



Thailand



- potensi ekowisata: kekayaan dan keunikan alam; hutan hujan tropika basah dan subtropika; alam pegunungan yang sejuk dan indah
- memiliki 600 aktivitas atau atraksi di wilayah tujuan ekowisata dalam berbagai taman nasional.
- Aktivitas ekosistem dikunjungi 67 persen pengunjung lokal dan 36 persen pengunjung asing.
- kunjungan wisatawan asing 8.6 juta orang per tahun (tahun 1998, tumbuh 10 persen). sasaran kunjungan 30 juta orang pada tahun 2010.

Isyu pokok pengembangan ekowisata:

- konservasi lingkungan. mereka terlena dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan asing, namun pada sisi lain, pengendalian dalam aspek lingkungan relatif lambat dilaksanakan.
- standar mutu pengelolaan. Sebagian besar aktivitas lebih tertuju kepada petualangan dan aset lingkungan dibanding aspek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan nilai-nilai budayanya.

Strategi pengembangan ekowisata :

1. Memelihara originalitas lingkungan dan area yang peka terhadap kerusakan
2. Menghindari potensi konflik di dalam pengelolaan sumberdaya
3. Menghasilkan pengganda (*multiplier*) atau kaitan ekonomi yang tinggi
4. Mempromosikan aspek pendidikan/ketrampilan, kesadaran masyarakat untuk upaya konservasi dibandingkan alasan ekonomi
5. Memfasilitasi keterlibatan organisasi atau penduduk lokal dalam perencanaan; dan membantu transfer pengetahuan dan nilai budaya
6. Pengembangan organisasi/kelembagaan pemasaran ekowisata didukung anggaran, SDM profesional, dan sistem manajemen modern
7. Pengembangan ekowisata terintegrasi dengan pembangunan tingkat lokal, regional dan nasional
8. Pengembangan riset dengan sasaran penyusunan panduan manajemen, pemecahan masalah, dan perencanaan yang sistematis
9. Pengembangan kelembagaan untuk pencegahan kerusakan lingkungan: penanaman disiplin, sosialisasi dan konsultasi dan peringatan
10. Penyusunan panduan dan kode etik untuk memandu partisipasi stakeholder dan distribusi manfaat

Vietnam

Vietnam memiliki sumberdaya alam khas Asia Tenggara, pegunungan dengan hutan tropika basah, dan mengalirkan sungai-sungai untuk mendukung budidaya padi. Mereka memiliki 11 taman nasional, 52 wilayah yang dilindungi dan 22 lansekap yang dikonservasi. Vietnam juga memiliki ekosistem lahan basah sangat luas dan mendominasi daratannya, terdiri 79 area lahan basah. Vietnam memiliki 13 ribu spesies flora dan 15 ribu fauna, atau setara 6.5 persen dari jumlah spesies dunia. Kunjungan wisatawan asing naik 7 kali dari tahun 1991 sebanyak 300 ribu orang menjadi 2.14 juta pada tahun 2000, Pada periode yang sama, wisatawan domestiknya naik dari 1.5 menjadi 11.3 juta orang. Dari jumlah itu, 30 persen turis asing dan 50 turis domestik mengunjungi tujuan ekowisata (Hong, Dao and Thoa, 2002)

Pengembangan ekowisata Vietnam terintegrasi di dalam strategi peningkatan produktivitas dan mutu lingkungan yang berkelanjutan, atau apa yang disebut dengan Green Productivity (GP) (Hong, 2002) . Prinsip-prinsip GP di dalam ekowisata meliputi:

- Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- Meminimalkan tingkat konsumsi dan pencemaran
- Mengintegrasikan perencanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan ekowisata
- Mendukung pembangunan ekonomi lokal
- Pengembangan sumberdaya jasa ekowisata
- Penyediaan informasi pemasaran perihal lansekap dan sejarah wilayah tujuan ekowisata
- Penelitian dan pengembangan untuk identifikasi dan pemecahan masalah, serta perumusan kebijakan
- Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi penduduk lokal dalam pengelolaan ekowisata



Malaysia



Malaysia berhasil dalam pengembangan sektor pariwisata, memiliki 20 tujuan ekowisata yang menyebar dalam area yang dilindungi seluas 1.5 juta hektar atau 5 persen luas daratan

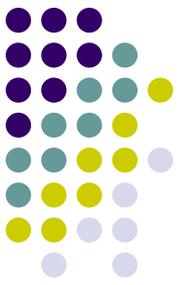
Kunjungan wisatawan asing rata-rata 8 juta orang. Dari jumlah itu, 7 hingga 10 persen melaksanakan aktivitas ekowisata, sementara 14 persen tertarik dengan petualangan, pendakian dan penjelajahan.

Pengelolaan bisnis ekowisata secara profesional: 2000 biro perjalanan wisata, 3500 pemandu bersertifikat, dan 30 perusahaan dengan spesialisasi ekowisata. Kemampuan penduduk lokal berbahasa Inggris dan Mandarin, Asosiasi jasa wisata terintegrasi di Malaysia semenanjung dan di Sabah atau Serawak.

Malaysia memperoleh devisa jasa wisata sekitar 13.4 miliar ringgit per tahun (setara 35 triliun rupiah). Wisatawan asing berasal dari (khususnya) Jepang, Cina dan Singapura. Beberapa tahun terakhir, wisatawan asing datang dari negara Timur Tengah, India, Eropa, Amerika Serikat dan Australia

Kebijakan ekowisata Malaysia

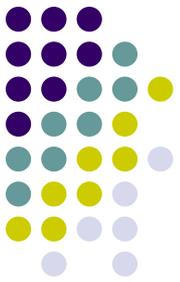
- Mengadopsi definisi dan pemahaman tentang ekowisata
- Mengadopsi kebijakan pengembangan ekowisata
- Memperkuat kelembagaan implementasi agro dan ekowisata
- Mengimplementasikan aspek legal perencanaan ekowisata
- Mengembangkan program monitoring dan evaluasi



Panduan pengelolaan ekowisata Malaysia

- Menyusun prosedur perencanaan untuk pengembangan ekowisata
- Mengembangkan sistem pengelolaan nasional untuk wilayah ekowisata
- Mengembangkan rencana wilayah tujuan ekowisata tingkat lokal
- Melaksanakan pilot project ekowisata
- Mengembangkan produk-produk dan jasa pada taman nasional
- Mengembangkan strategi promosi
- Menelaah kebijakan fiskal untuk mendukung pengembangan ekowisata
- Menyusun rencana pengembangan SDM ekowisata
- Menjamin partisipasi penduduk lokal
- Meneliti kelayakan skema akreditasi
- Menyempurnakan panduan-panduan ekowisata
- Memperbaiki standar mutu Universitas Widjagama Malang ekowisata





XI. EKOWISATA DI INDONESIA

Menurut Conservation International, CI, Indonesia memiliki sumberdaya keanekaragaman hayati dunia:



- posisi kedua sesudah Brazil, dari 17 negara megadiversity (jml spesies)
- memiliki dua dari 25 hotspot dunia (=highly threated area)
- memiliki 18 dari 200 ekosistem dunia, (=Global 200 ecoregions)
- memiliki 24 dari 218 wilayah endemik burung,
- memiliki 10 persen dari spesies tanaman berbunga di dunia, dan
- menempati peringkat teratas dalam keragaman hayati spesies tanaman pertanian dan ternak.





- Kunjungan wisman terkonsentrasi ke Bali (lewat Bandara Ngurah Rai), mencapai 40 persen dari 4 - 5 juta wisman (Malaysia 8 juta, Singapura 15 juta orang)
- Ekowisata di Bali memuat aspek budaya 40 persen, dan aspek lingkungan 60 persen.
- Proporsi ekowisata di Indonesia: 90 % lingkungan dan 10 % budaya (Dalem, 2002).
- Nilai ekonomi ekowisata < 5 persen dari total jasa wisata
- Kawasan konservasi kepulauan (daratan dan perairan) berpotensi untuk pengembangan jasa ekowisata.
- Sumberdaya perairan relatif belum tersentuh dibanding daratan. Padahal, atraksi dan program pembelajaran dari ekosistem perairan memberi manfaat, nilai tambah dan kesejahteraan yang relatif tinggi.



Sejarah Perkembangan Ekowisata di Indonesia



Tahapan pertama, periode imperialisme dunia

- Periode 1900 hingga 1910, di Eropa berkembang gerakan penyelamatan lingkungan hutan dan nilai-nilai tradisi hutan, beserta bangunan dan lansekapnya.
- Di Indonesia, Hindia Belanda mendokumentasikan 110 situs alam (*nature monument ordonance*), kebanyakan berlokasi di pulau Jawa
- Periode 1920an. Timbul gerakan konservasi. *London Convention on African Wildlife* (1932) perihal pembentukan taman nasional, perlindungan flora fauna dan cagar alam. Hindia Belanda mendisain 17 area konservasi flora dan fauna di Sumatera dan Kalimantan.
- Terbangun prinsip akademik tentang flora fauna, lansekap, bangunan alam atau lingkungan, hingga kelembagaan pengelolaan dan pembiayaan konservasi.
- Hingga Indonesia merdeka, warisan yang masih terpelihara, misalnya TN Gede Pangrango dan Kebun Raya Bogor, khususnya untuk konservasi flora dan media ilmu pengetahuan botani.

Sejarah Perkembangan Ekowisata di Indonesia



Tahapan kedua, pengaruh perhatian dunia

- Konperensi Stockholm (United Nation Conference on Human Environment, UNCHE) 16 Juni 1972
- 1974 hingga 1982, IUCN atau World Conservation Union, intensif mengembangkan jaringan kawasan konservasi dunia (ekosistem, habitat, dan spesies).
- *Inter-Parliamentary Conference on Global Environment* di New York, Maret 1990 (IPCGE, 1990). Konperensi Rio (United Nation Conference on Environment and Development, UNCED), 3 - 14 Juni 1992, salah satu hasilnya adalah Convention on Biological Diversity (CBD).
- Di Indonesia, disusun Biodiversity Action Plan for Indonesian (BAPI) pada tahun 1993, sebagai ratifikasi dari Convention on Biological Diversity (CBD), yang disahkan melalui UU No 5 tahun 1994.
- Pada tahun 2003, disusun The Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). Tahapan kedua memberikan kerangka berpikir kelembagaan beroperasinya ekowisata.

Sejarah Perkembangan Ekowisata di Indonesia



Tahapan ketiga, partisipasi *stakeholder* ekowisata.

- Lahir komunitas ekowisata di Indonesia, diilhami oleh The Ecotourism Society (TES) tahun 1991 di Amerika Serikat. TES berhasil membangun *expertise* perihal prinsip konservasi dan teknik implementasi ekowisata, beserta pengembangan jaringan organisasi.
- Masyarakat Ekowisata Indonesia atau MEI (*Indonesian Ecotourism Society*) lahir di Bali 1 hingga 5 Juli 1996. Ruang lingkup aktifitas MEI (i) mengembangkan kesadaran konservasi dan keberlanjutan jasa ekowisata, (ii) mengembangkan unsur pendidikan di dalam jasa ekowisata, dan (iii) meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan penduduk lokal di sekitar wilayah tujuan ekowisata.
- Komunitas ekowisata melalui internet. ekowisataindonesia@yahoo-groups.com atau indobackpacker@yahoogroups.com, atau EcoTourismOnLine@yahoogroups.com. Media ekowisataindonesia@yahoogroups.com dimoderatori oleh Indecon, LSM ekowisata di Jakarta.

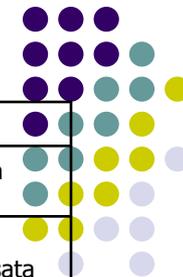


Kelembagaan/Peraturan Ekowisata

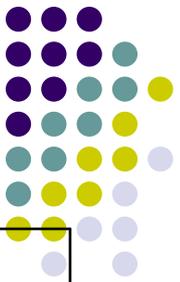


- Tap MPR IX/2001: Reformasi Agraria dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU 5/1983: Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia
- UU 9/1985: Perikanan
- UU 5/1990: Konservasi keanekaragaman hayati
- UU No. 5/1994: Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
- UU No. 9/1990: Kepariwisataaan;
- UU 24/1992: Penataan Ruang.
- UU 23/1997: Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU 19/2004: Kehutanan
- UU 32/2004: Pemerintahan (Otonomi) Daerah
- UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- PP No. 18/1994: Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
- PP No 68/1998: Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Kebijakan Sektor Ekowisata



No	Sektor	Wewenang dan tanggungjawab
1	Departemen Kehutanan (Dephut)	Menguasai lahan hutan (seluas 68 persen daratan), meliputi hutan lindung, taman nasional dan cagar alam serta pengelolaan jasa wisata alam.
2	Kantor Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar)	Kebijakan dan promosi kebudayaan, menetapkan standar layanan pariwisata (termasuk best practice ecotourism) dan akomodasi/ penunjang pariwisata dan pengembangan industri pariwisata
3	Kantor Menteri Lingkungan Hidup (KLH)	Pengelolaan dampak lingkungan, penyusunan kebijakan, baku mutu dan kriteria program lingkungan; dan regulasi pencemaran
4	Bappenas	Koordinasi pembangunan tingkat nasional dan perencanaan alokasi sumberdaya pembangunan
5	Kantor Menteri Koordinator Perekonomian	Koordinasi sektor keuangan, perencanaan pembangunan, industri dan perdagangan dan badan usaha negara serta ketua perunding dengan negara-negara donor
6	Departemen Pertahanan (Dephan)	Kebijakan pertahanan, pengawasan perbatasan, penegakan hukum, operasi militer dan kepolisian
7	Departemen Dalam Negeri (Depdagri)	Kebijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pengembangan kapasitas daerah, dan hubungan antar daerah, dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam
8	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Penataan, regulasi dan perijinan penggunaan lahan di luar wilayah kehutanan.
9	Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil)	Pengembangan infrastruktur dan penataan ruang wilayah kota dan desa
10	Kantor Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)	Pengembangan riset dan teknologi terkait dengan identifikasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya alam
11	Departemen Keuangan (Depkeu)	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perpajakan, distribusi keuangan dan alokasi khusus ke daerah, (perimbangan keuangan)
12	Departemen Pertanian (Deptan)	Kebijakan produksi pangan; dan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
13	Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP);	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, industri perikanan, dan pengelolaan wilayah (taman nasional) laut yang dilindungi
14	Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESM)	Peraturan dan kebijakan pengelolaan minyak, tambang dan energi industri
15	Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag)	Kebijakan perijinan usaha, lisensi, perdagangan internasional termasuk tarif dan ekspor.
16	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Pertahanan negara, menjaga perbatasan dan ketertiban publik, mengamankan upaya investigasi dan illegal logging dan fishing
17	Kepolisian	Penegakan hukum sipil, ketertiban hukum, penanganan kriminal khususnya investigasi dan illegal logging dan fishing ,
18	Departemen Kehakiman dan HAM (DepkehHAM);	Penguatan sistem legal beserta peraturannya, dan jaminan dalam kesamaan hak di muka hukum
19	Pengadilan	Pengambilan keputusan vonis hukum sebagai akibat bertentangan dengan kepentingan publik, misalnya kriminal illegal logging



Klasifikasi Hubungan dan Kebijakan Ekowisata

Hubungan industri	Hubungan fungsional organisasi		
	Perencanaan (<i>plan</i>)	Pelaksanaan (<i>do and action</i>)	Pengendalian/monitoring (<i>check</i>)
Hulu	Bappenas, Menko Perekonomian, Dephan,	Depkimpraswil, Depkeu, Menristek	-
Utama	Depdagri (BPN), Depkimpraswil	Dephut, Depparbud	KLH, Depdagri
Hilir	-	Deptan, DKP, DESM, Depdagri, Deperindag	TNI, Kepolisian, DepkehHAM, Pengadilan



Landasan penetapan taman nasional:

- Memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, flora dan fauna yang khas, kondisi terancam/punah,
- Merupakan daerah resapan air yang penting bagi kawasan di sekitarnya,
- Memiliki panorama yang indah dengan berbagai potensi wisata alam khususnya ekowisata,
- Memiliki potensi atraksi tradisi/budaya yang menarik (termasuk situs dan bangunan sejarah) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- Memiliki potensi pendidikan dan penelitian, dan
- Keperluan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



Taman Nasional di Indonesia

Taman Nasional	Luas ha	Lokasi, propinsi	Ekosistem	Keputusan Menteri Mentan No.
1 Bukit Barisan Selatan	365.000	Bengkulu, Lampung	Hutan Tropika ^{S)}	736/Mentan-X/1982
2 Gunung Palung	90.000	Kalbar	Hutan Tropika, Rawa ^{S)}	448/Kpts-VI/1990
3 Rawa Aopa Watumohai	105.194	Sultra	Rawa, Hutan Tropika ^{S)}	756/Kpts-II/1990
4 Bunaken	89.065	Sulut	Laut, pesisir ^{S)}	730/Kpts-II/1991
5 Bukit Baka-Bukit Raya	181.090	Kalbar, Kalteng	Hutan Tropika ^{S)}	281/Kpts-II/1992
6 Ujung Kulon	122.956	Banten	Hutan tropika, Pesisir, laut ^{S)}	284/Kpts-II/1992
7 Berbak	162.700	Jambi	Rawa gambut, air tawar ^{S)}	285/Kpts-II/1992
8 Bogani Nani Wartabone	287.115	Sulut, Gorontalo	Hutan Tropika ^{S)}	731/Kpts-II/1992
9 Alas Purwo	43.420	Jatim	Hutan Tropika ^{t)}	190/Kpts-II/1993
10 Siberut	190.500	Sumbar	Hutan Tropika ^{S)}	407/Kpts-II/1993
11 Kutai	198.629	Kaltim	Rawa, Hutan Tropika ^{t)}	325/Kpts-II/1995
12 Betung Kerihun	800.000	Kalbar	Hutan Tropika ^{S)}	467/Kpts-II/1995
13 Bali Barat	19.002	Bali	Hutan Tropika, Pesisir, laut ^{t)}	493/Kpts-II/1995
14 Kayan Mentarang	1.360.500	Kaltim	Hutan Tropika ^{S)}	631/Kpts-II/1996
15 Tanjung Putting	415.040	Kalteng	Rawa, Hutan Tropika ^{t)}	687/Kpts-II/1996
16 Lorentz	2.450.000	Papua	Rawa, Hutan Tropika ^{S)}	154/Kpts-II/1997
17 Gunung Leuser	1.094.692	N Aceh Darussalam	Hutan Tropika ^{t)}	276/Kpts-VI/1997
18 Meru Betiri	58.000	Jatim	Rawa, Hutan Tropika ^{t)}	277/Kpts-VI/1997
19 Bromo Tengger Semeru	50.276	Jatim	Hutan Tropika ^{S)}	278/Kpts-VI/1997
20 Baluran	25.000	Jatim	Savana, pantai, Hutan Tropika	279/Kpts-VI/1997
21 Gunung Rinjani	40.000	NTB	Hutan Tropika ^{S)}	280/Kpts-VI/1997
22 Manusela	189.000	Maluku	Hutan Tropika ^{S)}	281/Kpts-IV/1997
23 Wasur	413.810	Papua	Savana, rawa ^{S)}	282/Kpts-VI/1997
24 Kelimutu	5.000	NTT	Hutan Tropika ^{S)}	675/Kpts-II/1997
25 Laiwangi-Wanggameti	47.014	NTT	Hutan Tropika ^{S)}	576/Kpts-II/1998

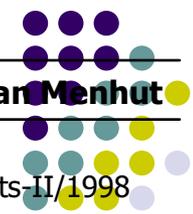
S) ancaman sedang

t) ancaman tinggi

Universitas Widyagama Malang

Sumber: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm dan USAID Indonesia (2004)

Taman Nasional di Indonesia



Taman Nasional	Luas ha	Lokasi, propinsi	Ekosistem	Keputusan Menhut	
26	Manupeu-Tanah Daru	87.984	NTT	Hutan Tropika ^{S)}	576/Kpts-II/1998
27	Danau Sentarum	132.000	Kalbar	Rawa, danau ^{S)}	34/Kpts-II/1999
28	Lore Lindu	217.991	Sulteng	Hutan Tropika ^{S)}	646/Kpts-II/1999
29	Way Kambas	125.621	Lampung	Rawa, Hutan Tropika ^{S)}	670/Kpts-II/1999
30	Kerinci Seblat	1.375.349	Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel	Hutan Tropika ^{S)}	901/Kpts-II/1999
31	Komodo	173.300	NTT	Savana, pesisir ^{S)}	172/Kpts-II/2000
32	Bukit Dua Belas	60.500	Jambi	Hutan Tropika ^{S)}	258/Kpts-II/2000
33	Kep Karimunjawa	110.117	Jateng	Laut, Pesisir ^{t)}	74/Kpts-II/2001
34	Taka Bonerate	530.765	Sulsel	Laut, Pesisir ^{S)}	92/Kpts-II/2001
35	Kep Wakatobi	1.390.000	Sultra	Laut, Pesisir ^{S)}	765/Kpts-II/2002
36	Kep Seribu	108.000	Jakarta	Laut, Pesisir ^{t)}	6310/Kpts-II/2002
37	Bukit Tiga Puluh	127.698	Riau, Jambi	Hutan Tropika ^{S)}	6407/Kpts-II/2002
38	Tel Cenderawasih	1.453.500	Papua	Hutan propika, Laut, Pesisir ^{S)}	8008/Kpts-II/2002
39	Sembilang	205.078	Sumsel	Rawa gambut, air tawar ^{S)}	95/Kpts-II/2003
40	Gunung Gede Pangrango	15.000	Jabar	Hutan Tropika ^{t)}	174/Kpts-II/2003
41	Gunung Halimun	40.000	Jabar, Banten	Hutan Tropika ^{t)}	175/Kpts-II/2003
42	Aketajawe-Lolobata	167.300	Halmahera, Maluku Utara	Hutan Tropika	397/Menhut-II/2004
43	Bantimurung - Bulusaraung	43.750	Sulsel	Hutan Tropika	398/ Menhut-II/2004
44	Batang Gadis	108.000	Sumut	Hutan Tropika	126/ Menhut-II/2004
45	Gunung Ciremai	15.500	Jabar	Hutan Tropika	424/ Menhut-II/2004
46	Gunung Merbabu	5.725	Jateng	Hutan Tropika	135/ Menhut-II/2004
47	Gunung Merapi	6.410	Jateng	Hutan Tropika	134/ Menhut-II/2004
48	Togean	362.605	Sulteng	Hutan Tropika, Laut, Pesisir	418/ Menhut-II/2004
49	Sebangau	568.700	Kalteng	Rawa Gambut	423/Menhut-II/2004
50	Tesso Nilo	38.576	Riau	Hutan Tropika	255/Menhut-II/2004

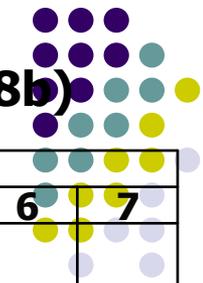
S) ancaman sedang

t) ancaman tinggi

Universitas Widyagama Malang

Sumber: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm dan USAID Indonesia (2004)

Kriteria Penetapan Zona dalam Taman Nasional (Siswanto, 1998b)



No	Kriteria	Zona						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Keperwakilan (<i>representation</i>);	√	√					
2	Keaslian (<i>originality</i>) dan kealamian (<i>naturalness</i>);	√	√	√				
3	Keunikan (<i>uniqueness</i>);	√	√	√				
4	Kelangkaan (<i>rarity</i>);	√	√					
5	Laju kepunahan (<i>rate of exhaustion</i>);	√	√		√			√
6	Keutuhan ekosistem (<i>ecosystem integrity</i>);	√	√		√	√		
7	Keutuhan sumber daya/kawasan (<i>intactness</i>);	√	√		√	√		√
8	Luasan (<i>area/size</i>);	√	√	√	√	√	√	
9	Keindahan alam (<i>natural beauty</i>);			√			√	
10	Kenyamanan (<i>amenity</i>);			√				
11	Kemudahan pencapaian (<i>accessibility</i>);			√			√	
12	Nilai sejarah (<i>historical value</i>);			√			√	
13	Ancaman manusia (<i>threat of human interference</i>).				√	√		√

Keterangan zona: (1) inti, (2) rimba, (3) pemanfaatan, (4) pemanfaatan tradisional, (5) pemanfaatan khusus, (6) situs budaya, dan (7) rehabilitasi

Zona dalam Taman Nasional (Siswanto, 1998b)



1. *Zona inti*, adalah bagian dari kawasan yang mutlak dilindungi, tanpa aktivitas manusia. Pada zona inti terletak keaslian, keunikan, dan kelangkaan wilayah TN.
2. *Zona rimba*, berada di antara zona inti dengan zona pemanfaatan dan/atau zona lainnya dan berfungsi sebagai zona peralihan. Dalam zona rimba, proses alami tetap menjadi prioritas namun aktifitas manusia diperkenankan scr terbatas
3. *Zona pemanfaatan* (intensif/wisata), adalah kawasan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Kegiatan dan perubahan di zona ini relatif paling longgar walaupun kegiatan yang bersifat ekstraktif tetap dilarang.
4. *Zona pemanfaatan tradisional*, adalah kawasan kegiatan tradisional penduduk setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari dan bersifat non-komersial.
5. *Zona pemanfaatan khusus*, adalah kawasan yang karena kondisi lingkungan dan potensinya oleh masyarakat telah dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang bersifat khusus dengan pengaturan yang bersifat khusus pula.
6. *Zona situs budaya*, adalah kawasan lokasi kegiatan manusia di masa lalu dan meninggalkan karya budaya yang mempunyai nilai sejarah. Lokasi dimaksud termasuk yang masih sering dikunjungi oleh masyarakat.
7. *Zona rehabilitasi* adalah kawasan yang mengalami kerusakan dan perlu direhabilitasi dengan jenis tanaman setempat. Zona rehabilitasi yang telah dipulihkan dapat diubah menjadi zona rimba atau zona lainnya sesuai dengan perkembangan kondisinya.

Sejarah penetapan Taman Nasional di Indonesia



1. Warisan penjajah Belanda. TN ini merupakan kawasan konservasi flora fauna yang dikembangkan saat penjajahan Belanda pada awal abad 19. Termasuk dalam kelompok ini adalah TN Gede Pangrango, TN Ujung Kulon, TN Meru Betiri, TN Kepulauan Seribu, TN Baluran, TN Gunung Leuser, dan TN Kerinci Seblat.
2. Warisan pengusahaan hutan. TN ini sebelumnya adalah area pengusahaan hutan hasil kebijakan UU 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Saat itu, eksploitasi hutan adalah bagian dari kebijakan pembangunan sektor primer, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, Termasuk dalam kelompok kedua antara lain TN Batanggadis, TN Aketajawe-Lolobata, TN Bukit Dua Belas, TN Tesso Nilo, dan TN Kayan Mentarang.
3. Warisan masyarakat turun-temurun. TN ini sebelumnya merupakan hutan yang menurut masyarakat adalah bagian dari kehidupan ekonomi dan sosialnya. Termasuk dalam kelompok kedua adalah TN Gunung Ciremai, dan TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu.

Pengakuan Masyarakat Lereng Gunung Merapi



Kami masyarakat yang bertempat tinggal di lereng Gunung Merapi sejak dahulu kala dari nenek moyang kami. Lokasi pemukiman kami yang sangat jauh dari perkotaan dan sulitnya sarana atau alat transportasi untuk menuju ke lokasi kami, membuat kami lebih meyakini dan saling ketergantungan dengan alam sekitar, termasuk Gunung Merapi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak, maka kami berusaha dengan cara berkebun dan bertani di lereng Gunung Merapi dan juga beternak yang rumputnya pun kami ambil dari lereng Gunung Merapi. Dengan usaha kami tersebut, berarti kami telah membantu pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran yang setiap tahun semakin bertambah.

Dalam melakukan usaha kami tersebut, kami sadar akan arti dan fungsi hutan ikut serta dalam pelestarian maupun penghijauan terhadap hutan di sekitar Gunung Merapi, karena keberadaan Gunung Merapi merupakan tulang punggung kehidupan dan sumber mata air bagi kami (masyarakat kawasan Merapi dan sekitarnya), sehingga selama ini kami selalu menjaga dan mengelola agar kawasan Gunung Merapi tidak rusak

Kami dengan kesadaran yang tinggi membantu tugas pemerintah bila terjadi bencana alam seperti kebakaran hutan maka kami yang pertama kali memadamkan api tersebut, contohnya ketika terjadi kebakaran hutan di Bukit Turgo, maka masyarakat Dusun Turgo dan Dusun Ngandong yang pertama kali berusaha memadamkan api tersebut bahkan kami rela sehari-hari secara bergantian menjaga lokasi agari tidak merembet ke daerah lainnya. Disamping itu ketika Gunung Merapi meletus maka kami juga yang pertama kali terkena dampaknya, Contohnya ketika terjadi letusan Gunung Merapi tahun 1994 yang memakan korban jiwa dan harta benda

Sumber: Surat Terbuka Kepada Presiden RI Mengenai Masalah Tani

http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/040617_tnmerapi-merbabu_sp/ [21 April 2006]

Permasalahan pembangunan yang menjadi kendala pengembangan ekowisata



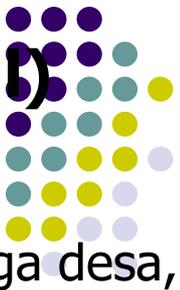
- Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk: kualitas rendah, kemiskinan, kontra-produksi dengan aspek lingkungan
- Perdagangan global. mekanisme pasar versus alokasi sumberdaya alam, penurunan keanekaragaman hayati dan potensi ekowisata.
- Lemahnya infrastruktur. Ketidak-mampuan investasi infrastruktur mengakibatkan potensi ekowisata tidak terealisasi ke dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan penduduk lokal.
- Lemahnya kesadaran: pemahaman tentang ekowisata kepada stakeholder, mendukung kaidah-kaidah konservasi
- Lemahnya aspek kelembagaan. prosedural birokrasi jasa ekowisata dan wewenangnya perlu terdefiniskan secara bertanggungjawab
- Penegakan hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kemungkinan ancaman dan kepentingan ekonomi di sekitar wilayah ekowisata, misalnya pertambangan atau pemukiman, atau praktek yang melanggar konservasi

Konservasi keanekaragaman hayati (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, IBSAB) (Bappenas, 2003), terdiri delapan arahan:



1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis pengetahuan dan kearifan lokal.
2. Mendorong dan memperluas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati.
3. Meningkatkan konservasi fungsi dan keseimbangan ekosistem di tingkat lokal, regional dan nasional untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada saat sekarang dan akan datang.
4. Membangun kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan dan sosial disesuaikan dengan tujuan-tujuan perbaikan distribusi kesejahteraan, perlindungan hak-hak dan peningkatan martabat penduduk lokal.
5. Mengembangkan sistem pengelolaan keanekaragaman hayati (mencakup aspek konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan), yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan indigenous lokal.
6. Membangun dan mengembangkan kerangka kelembagaan dan kebijakan yang efektif di tingkat nasional, regional dan lokal;
7. Mendorong dan memulai pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi wewenang pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
8. Mengembangkan mekanisme penyelesaian masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di tingkat lokal, nasional dan internasional;

Kebijakan pengembangan ekowisata (paling kritis)



Pengembangan kapasitas lokal:

- memperkuat pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten hingga desa,
- menyusun kebutuhan masyarakat lokal didampingi LSM, kepercayaan TN dan dukungan pemerintah setempat.

Infrastruktur:

- inisiatif pemerintah dan TN untuk membuka akses wilayah
- Semakin banyak pengunjung, akan mengundang investasi infrastruktur.

Konsistensi kebijakan:

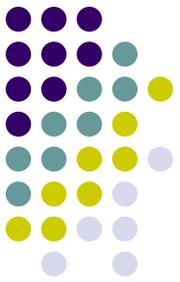
- membangun *brand image* yang menarik/konsisten, seperti *Malaysia Truly Asia*.
- Brand image *Indonesia, ultimate in diversity* (th 2004), perlu di **gaung** kan
- Upaya konservasi keanekaragaman hayati yang berjangka panjang
- kerjasama internasional serta mekanisme pendanaan jangka panjang

Integrasi promosi:

- mengikuti positioning Bali dengan berbagai kelebihanannya.
- jasa pariwisata dan penunjangnya di tingkat daerah perlu berintegrasi mempromosikan ekowisata.

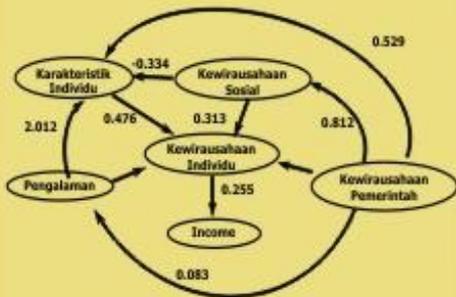
Pengembangan produk

- pengembangan produk, mengarah ke pendidikan dan ketrampilan
- Peningkatan kualitas dan keunikan lokal



XII. TAMAN NASIONAL DI INDONESIA

KEWIRAUSAHAAN EKOWISATA TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU



Model Struktur Kewirausahaan



Deskripsi Wilayah

- ↳ Lokasi: Kab Pasuruan, Kab Probolinggo, Kab Lumajang, dan Kab Malang
- ↳ Ekosistem: Hutan tropika
- ↳ Ketinggian: 750 - 3676 m di atas permukaan laut
- ↳ Temperatur: 3 - 20° C
- ↳ Penduduk lokal: Tengger
- ↳ Usaha tani penduduk Tengger: hortikultura, palawija, tanaman pangan
- ↳ Produk dan jasa ekowisata (i) Lingkungan dan budaya: flora fauna, lautan pasir, matahari terbit; savana, ranu pane, ranu kumbolo, air terjun pelangi, budaya Tengger, upacara kasodo; (ii) Manfaat lansekap: pendakian gunung Semeru, trekking, para layang; (iii) Akomodasi: hotel, homestay di Ngadisari, Ngadas dan Ranu Pane, camping ground; (iv) Peralatan/ perlengkapan: Pemandu wisata, sewa kuda, camping equipment, motor ojek, offroad jeep; (v) Pendidikan: kearifan lokal, plasma nutfah
- ↳ Usaha ekowisata penduduk Tengger: Pemandu, driver, penjual makanan, homestay

Tujuan Penelitian

- ↳ Mengukur uji kewirausahaan;
- ↳ Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik kewirausahaan

Skor Uji Kewirausahaan

Wilayah	Kewirausahaan		
	Individu	Sosial	Pemerintah
Cemorolawang	38.21	13.69	17.34
Ngadas	34.45	13.90	14.36
Ranupane	36.00	15.56	15.31
Total Wilayah	35.84	14.61	15.33

Keterangan :

- Uji kewirausahaan Individu: skor: 0 hingga 9 = Tidak berjiwa entrepreneur; 10 hingga 19 = Sedikit berjiwa entrepreneur; 20 hingga 29 = Sebagian berjiwa entrepreneur; 30 hingga 39 = berjiwa entrepreneur; 40 hingga 50 = Sangat berjiwa entrepreneur
- Uji kewirausahaan sosial atau pemerintah: skor: 0 hingga 5 = Tidak mendukung; 6 hingga 10 = Netral; 11 hingga 15 = Selangkah mendukung; 16 hingga 20 = Mendukung; 21 hingga 25 = Sangat mendukung

Kesimpulan

- ↳ Skor uji kewirausahaan individu penduduk Tengger sebesar 35,84, tergolong berjiwa entrepreneur.
- ↳ Skor uji kewirausahaan sosial penduduk Tengger sebesar 14,61, mempersiapkan masyarakat setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan
- ↳ Skor uji kewirausahaan pemerintah penduduk Tengger adalah 15,33, mempersiapkan pemerintah setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan
- ↳ Pengembangan kewirausahaan sosial adalah syarat perlu bagi pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan individu jasa ekowisata

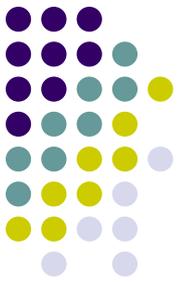


Iwan Nugroho. 2008 Uji Kewirausahaan untuk Mengukur Karakteristik Kewirausahaan Penduduk Lokal pada Jasa Ekowisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Universitas Widyagama Malang. Penelitian Fundamental, DP2M-DIKTI, Jakarta



TN Bromo Tengger Semeru





TERIMAKASIH